



**FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
TAHUN 2009-2017**

SKRIPSI

Oleh

Rezky Putri Kusumaningrum

150810101186

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
TAHUN 2009-2017**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Rezky Putri Kusumaningrum

150810101186

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku Bapak Kusnio dan Ibu Sri Mulyani, Bapak Zainal Arifin dan Mbah Kasanah, terimakasih atas kasih sayang, segala dukungan, cinta kasih yang tak terhingga, doa yang terus mengalir, nasehat, serta telah menjadi sumber motivasi dan semangat untuk menjalani hidup dan melangkah maju ke jalan yang lebih baik.
2. Kepada adek-adek ku yang tercinta Fadhilla dan Miza yang secara tidak langsung memberi motivasi lebih untuk menjadikan kakak yang lebih baik dan patut untuk dicontoh. Serta untuk mas Itok yang selalu menemani dan mensupport selama proses perskripsian ini.
3. Guru-guru sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang dengan ikhlas, sabar dan tabah mendidik dan membimbing saya hingga sampai pada saat ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Kau harus menciptakannya
(Penulis)

Jangan menunggu. Takkan pernah ada waktu yang tepat.
(*Napoleon Hill*)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rezky Putri Kusumaningrum

NIM : 150810101186

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2017” adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 Mei 2019

Yang menyatakan,

Rezky Putri Kusumaningrum

NIM.150810101186

SKRIPSI

**FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
TAHUN 2009-2017**

Oleh

Rezky Putri Kusumaningrum

150810101186

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Teguh Hadi Priyono, M.Si

Dosen Pembimbing II : Fajar Wahyu Priyanto, S.E, M.E

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-
2017

Nama Mahasiswa : Rezky Putri Kusumaningrum

NIM : 150810101186

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan : 26 Maret 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Teguh Hadi Priyono, M.Si

Fajar Wahyu Priyanto, S.E, M.E

NIP. 19700206 1994031 002

NIP. 19810330 2005011 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dr. Riniarti, MP

NIP. 19600430 1986032 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
TAHUN 2009-2017**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rezky Putri Kusumaningrum

NIM : 150810101186

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

3 Mei 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Herman Cahyo D, SE, MP ()
NIP. 197207131999031001
2. Sekertaris : Dr. Lilis Yuliaty, SE, M.Si ()
NIP. 196907181995122001
3. Anggota : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si ()
NIP. 19604121987021001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,



Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak.CA.

NIP.197107271995121001

Fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di
Jawa Timur Tahun 2009-2017

Rezky Putri Kusumaningrum

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Flypaper effect ialah respon pemerintah daerah pada belanja daerah lebih banyak terhadap dana yang bersumber dari transfer/grant (dana perimbangan) atau lebih spesifiknya transfer tidak bersyarat dari pada pendapatan asli daerahnya. Tujuan pertama penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum serta pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2009-2017. Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan panel *dynamic Ordinary Least Square* (DOLS). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja daerah, serta variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Jawa timur. Hasil kedua penelitian ini ialah adanya *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang ditunjukkan dengan koefisien dana perimbangan lebih besar dari pada pendapatn asli daerah.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, *Flypaper Effect*

*Flypaper Effect Phenomenon in Government Expenditure
of East Java Periode 2009-2017*

Rezky Putri Kusumaningrum

Departement of Development Economiecs, Faculty of Economics and Business,
University of Jember

ABSTRACT

Flypaper effect is response of the regional government to more regional expenditure on funds originating from transfers / grants (balancing funds) or more specifically the unconditional transfers of local revenues. The first objective of this study was to analyze the effect of balancing funds consisting of general allocation funds and the influence of local revenue on regional expenditure. In addition, this study also aims to analyze the presence or absence of flypaper effects on district / city expenditure in East Java from 2009-2017. The method of analysis in this study is using dynamic Ordinary Least Square (DOLS) panels. The independent variable used in this study is regional expenditure, and the dependent variable is regional original income and general allocation funds. The results of this study indicate that balancing funds and local revenue have a positive and significant effect on district / city expenditure in East Java. The second result of this study is the presence of a flypaper effect on district / city expenditure in East Java which is indicated by the coefficient of the balance fund greater than the original regional income.

Keywords: General Allocation Funds, Regional Original Revenue, Regional Expenditures, Flypaper Effect

RINGKASAN

Otonomi daerah diartikan sebagai pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian suatu daerah serta mengatur keuangan daerah itu sendiri. Daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta dapat meningkatkan kontribusi publik terhadap PAD. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan fiskal antarpemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh provinsi.

Namun permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Hal ini menyebabkan proporsi PAD tidak signifikan pada belanja daerah yang menyebabkan terjadinya *flypaper effect* atau dapat dikatakan bahwa proporsi DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh proporsi PAD terhadap belanja daerah. Daerah tidak menjadi lebih mandiri, malah semakin bergantung pada pemerintah pusat dan akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah serta menunjukkan ada tidaknya *flypaper effect* di kabupaten/kota Jawa Timur Tahun 2009-2017.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2009-2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder terdiri dari dua jenis

data yaitu data berkala (*time series*) dan data kerat lintang (*cross section*). Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan panel *dynamic Ordinary Least Square* (DOLS). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja daerah, serta variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil analisis uji t statistic yang menjelaskan bahwa nilai *P value* kedua variabel adalah 0.0000 (kurang dari $\alpha=5\%$). Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur periode 2009-2017 mengalami *flypaper effect*. Dimana syarat terjadinya *flypaper effect* adalah koefisien dana alokasi umum (1.169795) lebih besar daripada koefisien pendapatan asli daerah (1.105786).

Adanya *flypaper effect* pada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2009-2017 ini menunjukkan kondisi dimana stimulus terhadap belanja pemerintah daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam transfer tidak bersyarat yaitu DAU lebih besar daripada disebabkan oleh perubahan dalam PAD. *Flypaper effect* ini memberikan makna bahwa dalam merespon belanja pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer daripada menggunakan pendapatan daerahnya sendiri (PAD). Hal ini bertolak belakang dengan tujuan adanya desentralisasi yaitu kemandirian fiskal daerah.

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil'alamin saya panjatkan rasa puji syukur sebesar-besarnya kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kasih sayangNya, sehingga dengan didasari semangat yang tinggi, penuh kesabaran serta perjuangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang berjudul “Fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2017”. Skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Skripsi ini membahas mengenai belanja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa proses penulis bahwa proses penulis ini telah banyak memperoleh bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Dukungan yang terus mengalir pada proses penulisan, bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan kemudahan, keridhaan serta kelancaran dalam melaksanakan sesuatu yang dilaksanakan.
2. Bapak Dr. Teguh Hadi Priyono, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, ditengah kesibukannya, memberikan arahan, masukan dengan sabar dan ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Terimakasih atas segala arahan, bimbingan, ilmu, keikhlasan yang diberikan bapak kepada saya
3. Bapak Fajar Wahyu Priyanto, S.E, M.E selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini, serta terimakasih atas motivasi, bimbingan, perhatian serta pengalaman yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

4. Bu Dra. Nanik Istiyani, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar dari awal kuliah hingga akhir dan terselesainya skripsi ini
5. Bapak Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak, selaku ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
6. Ibu Dr. Sebastiana Viphindrartin, S.E, M,Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
7. Bapak Dr. Rafael Purtomo Somaji M,Si selaku dosen konsentrasi Ekonomi Regional yang telah memberikan motivasi, kritik, saran dengan sabar dan ikhlas kepada mahasiswa Ekonomi Regional 2015 dalam penyusunan skripsi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Ekonomi beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman kepada penulis.
9. Staf karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta staf perpustakaan pusat Universitas Jember yang telah memberikan fasilitas dalam kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh saudara-saudaraku *Edelweiss Family* Masfifah Aidita Tri Oktavia, Akmel San Martda, Divanggi Dinda Diarti, Rezky Putri Kusumaningrum, Ahmad Sa'id Nafi Al-habib, Evarista Adelia S, Putri Lestari W, Noer Muahammad Soleh, Angga Saiful Rizal, Agistia Riski, Agim Rifana, Gandis Eka Novianto yang sudah bersama lebih dari 3 tahun, teman dan sahabat pertama dikampus. Teman sepermainan dan teman muncak selama kuliah. Terimakasih banyak atas motivasi, tenaga dan dukungan serta pengalamannya selama kuliah bisa menjadi keluarga baru yang baik bagi penulis.
11. Seluruh anggota Antijones yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah mengajari penulis sehingga menjadi manusia yang lebih baik, khususnya Rana, Ertak, Rina, Adel.
12. Seluruh keluarga *PT Victory International Future* (khususnya staff *Vcoffea and tea*) yang sudah menjadi teman kerja, sahabat dan keluarga yang selalu memberi dukungan, motivasi serta pengalaman kepada penulis.

13. Seluruh teman-teman IESP 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah banyak memberikan masukan dan atas kerjasamanya selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga bisa menjadi orang sukses semua.
14. Teman-teman konsentrasi Ekonomi Regional IESP 2015 terimakasih atas dukungannya selama ini.
15. Saudara-saudaraku seperjuangan KKN Desa Biting Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember: Dzakir, Winner, Sarah, Tiara, Taffana, Mbak Sri, Mbak Wik, Banana, Tsani, terimakasih atas waktu, tenaga, ilmu dan pengalamannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kebersamaannya selama ini.
16. Semua pihak yang telah membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat mungkin saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak.

Tak ada yang pantas penulis ucapkan selain banyak-banyak terimakasih , semoga keikhlasan bantuan kalian semua baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan balasan yangb berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, itulah sifat manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik tuhan yang maha esa Allah SWT. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin Allahummah Amin.

Jember, 09 Mei 2019

Penulis

Rezky Putri Kusuamingrum

150810101186

DAFTAR ISI

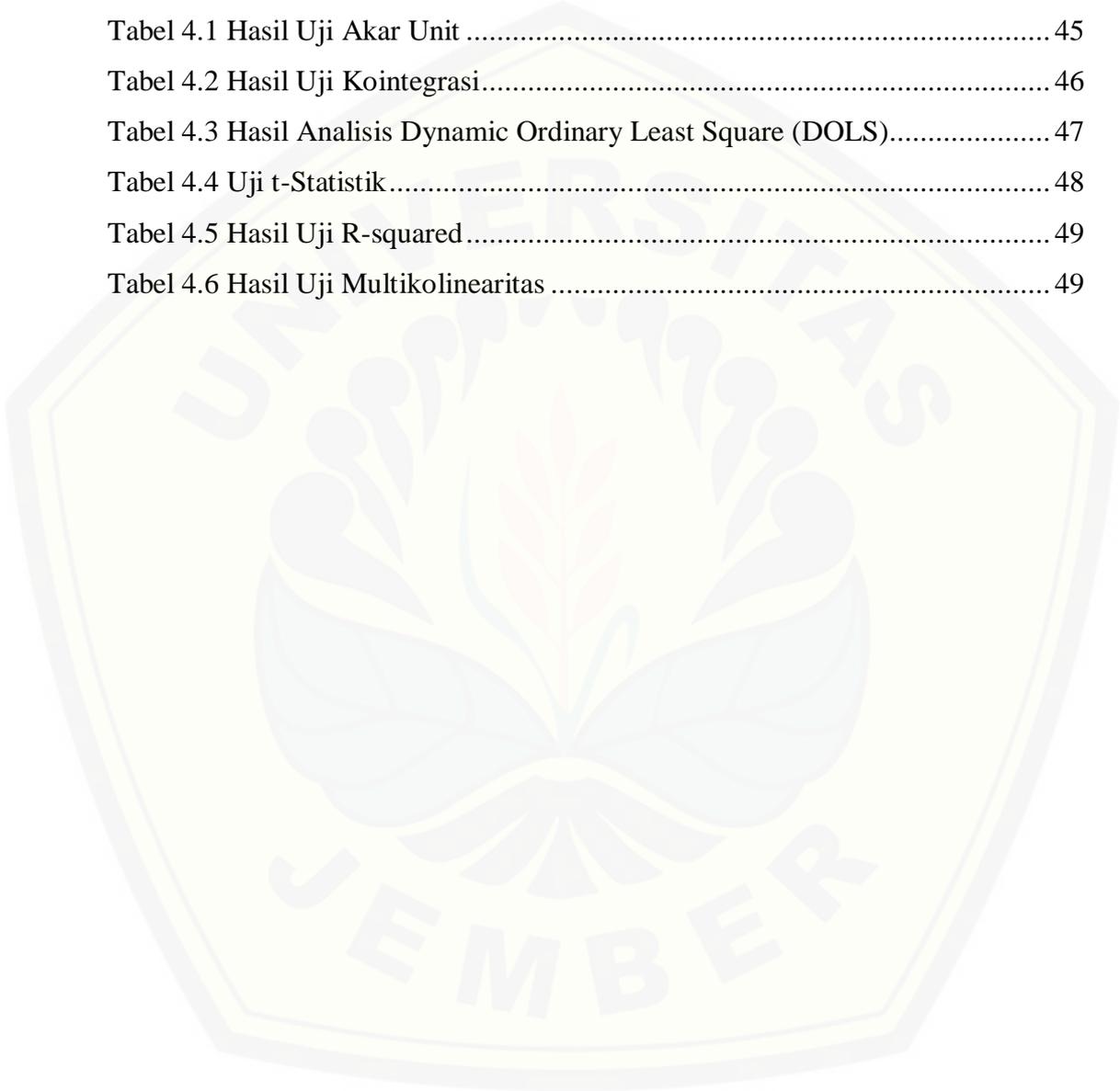
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Otonomi Daerah	9
2.1.2 Desentralisasi Fiskal.....	10
2.1.3 Perimbangan Keuangan	11
2.1.4 Pendapatan Daerah.....	12
2.1.5 Belanja Daerah	16

2.1.6	Teori Pengeluaran Pemerintah	20
2.1.7	Teori Transfer	22
2.1.8	Flypaper Effect	24
2.1.9	Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah.....	25
2.1.10	Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah.....	26
2.2	Penelitian Terdahulu	27
2.3	Hipotesis.....	28
2.4	Kerangka Konseptual.....	29
BAB 3. METODE PENELITIAN		30
3.1	Jenis dan Sumber Data.....	30
3.2	Objek Penelitian dan Prosedur Pengumpulan Data	30
3.3	Metode Analisis Data.....	31
3.3.1	Model dan Analisis Data Panel	31
3.3.2	Model dan Metode Analisis <i>Dynamic Ordinary Least Square</i> (DOLS)	32
3.4	Uji Statistik	34
3.5	Uji Asumsi Klasik	36
3.6	Identifikasi Variabel.....	37
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1	Gambaran Umum.....	39
4.1.1	Keadaan Geografis Provinsi Jawa Timur	39
4.1.2	Deskripsi Variabel Penelitian	40
4.2	Hasil Analisis Data.....	44
4.2.1	Hasil <i>Dynamic Ordinary Least Square</i> (DOLS).....	44
4.2.2	Uji Statistik	48
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	49
4.3	Pembahasan	51
4.3.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur 2009-2017	51
4.3.2	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur 2009-2017	52

4.3.3 Analisis <i>Flypaper Effect</i> Pada Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur	53
4.4 Keterbatasan Penelitian	54
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
Lampiran A. Data Penelitian	60
Lampiran B. Hasil Analisis	71
Lampiran C. Uji Statistik.....	91
Lampiran D. Uji Asumsi Klasik.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Trend Komposisi Pendapatan Daerah T.A 2010-2014	4
Tabel 1.2 Rasio PAD dan DAU Pada Belanja Daerah Jawa Timur 2001-2012	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 4.1 Hasil Uji Akar Unit	45
Tabel 4.2 Hasil Uji Kointegrasi.....	46
Tabel 4.3 Hasil Analisis Dynamic Ordinary Least Square (DOLS).....	47
Tabel 4.4 Uji t-Statistik.....	48
Tabel 4.5 Hasil Uji R-squared.....	49
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teori Pengeluaran Pemerintah Wagner (Sumber : Mangkoesubroto, 1997).....	20
Gambar 2.2 Teori Peacock dan Wiseman (Sumber : Mangkoesubroto, 1997).....	22
Gambar 2.3 Pengaruh Transfer Tak Bersyarat (Sumber : Kuncoro, 2007)	23
Gambar 2.4 Pengaruh Transfer Bersyarat (Sumber : Kuncoro, 2007)	24
Gambar 3.1 Kriteria Uji t-Statistik	35
Gambar 4.1 Peta Wilayah Jawa Timur di 38 Kabupaten/Kota (Provinsi Jawa Timur dalam angka 2017)	40
Gambar 4.2 Grafik PAD Jawa Timur 2009-2016 (Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur diolah)	41
Gambar 4.3 Grafik DAU Jawa Timur 2009-2016 (Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur diolah)	42
Gambar 4.4 Grafik BD Jawa Timur 2009-2016 (Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur diolah)	44

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu telah merubah seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Salah satu aspek reformasi yang masih mendapat perhatian sampai sekarang ini adalah kebijakan otonomi daerah yang telah membawa perubahan cukup berarti mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Indonesia menganut sistem desentralisasi atau otonomi daerah yang ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan adanya undang-undang tersebut maka suatu daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Cakupan wilayah yang luas yang menyebabkan keterbatasan pemerintah pusat dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di daerah merupakan salah satu alasan diterapkannya desentralisasi (Saragih, 2005). Otonomi daerah sendiri dipandang lebih demokratis dan mencerminkan desentralisasi yang sesungguhnya serta memberikan upaya kemandirian suatu daerah dalam rangka upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Hamroli, 2003) otonomi atau desentralisasi perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintahan dari suatu negara yang secara efektif mampu membuat kebijakan publik di segala bidang ataupun melaksanakan kebijaksanaan tersebut secara efisien di seluruh wilayah tersebut.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian suatu daerah (Mardiasmo, 2002). Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah dituntut dapat melaksanakan fungsi dan peranannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Salah satu kewenangannya adalah mengatur keuangan daerah itu sendiri. Dalam penyelenggaraannya,

pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan fiskal antarpemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh provinsi. Kesenjangan fiskal sendiri terjadi dikarenakan adanya perbedaan sumber pendapatan ekonomi dari masing-masing daerah. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relative besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang kecil. Pemberian DAU ini diharapkan dapat mengurangi disparitas fiskal horizontal, sehingga daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif sehingga dapat mendorong peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta dapat meningkatkan kontribusi publik terhadap PAD. Hal ini diharapkan agar kemandirian daerah menjadi semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah, yang menyebabkan tanggungan pemerintah untuk memberikan DAU bisa lebih dikurangi.

Suatu daerah memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rincian rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran. Berdasarkan desentralisasi maka pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan daerahnya masing-masing, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Hal tersebut dikarenakan agar pendapatan daerah menjadi sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasional utama sehari-hari yang ada di suatu daerah. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber potensi ekonomi yang ada di daerah itu sendiri. PAD setiap daerah berbeda-beda, daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang cenderung tinggi akan memiliki PAD dengan jumlah yang

jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya.

Selain itu, menurut (Halim, 2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Bukti-bukti empiris secara internasional menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada transfer ternyata berhubungan negatif dengan hasil governansinya. Hal ini berarti pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang digali dari masyarakat sendiri dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat (Kuncoro, 2004).

Disaat transfer DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Hal ini menyebabkan proporsi PAD tidak signifikan pada belanja daerah yang menyebabkan terjadinya *flypaper effect* atau dapat dikatakan bahwa proporsi DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh proporsi PAD terhadap belanja daerah. Dengan kata lain pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah. Daerah tidak menjadi lebih mandiri, malah semakin bergantung pada pemerintah pusat (Ndadari, 2008). Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat (Shah, 1994), bukannya mengeksplorasi basis pajak local secara lebih optimal (Oates, 1999). Keadaan tersebut juga ditemui pada kasus pemerintahan daerah kota dan kabupaten di Indonesia. Pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Simanjuntak, 2001).

Tabel 1.1 Trend Komposisi Pendapatan Daerah T.A 2010-2014 (Dalam milyar Rupiah)

Pendapatan Daerah	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
PAD	71,856	90,393	112,745	140,328	180,397
Dana Perimbangan	292,281	327,368	380,984	433,213	482,221
Pendapatan lain-lain yang sah	22,2015	42,132	54,984	79,971	96,908

Sumber: Data APBD konsolidasi 2010-2014 pada deskripsi analisis APBD Depkeu 2014

PAD kota/kabupaten secara nasional rata-rata tumbuh lebih cepat daripada peningkatan transfer dari pusat ke daerah. Pertumbuhan PAD kabupaten/kota tumbuh 64,98% pada periode 2010-2014, sedangkan dana perimbangan tumbuh 151%% pada periode yang sama. Dengan demikian tingkat ketergantungan keuangan daerah pada pusat cenderung semakin tinggi, atau dengan kata lain daerah cenderung tidak mandiri. (Kuncoro, 2004) menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20%. Akibatnya terjadi ketergantungan antara pemerintah daerah kepada dana transfer dari pemerintah pusat sehingga memicu terjadinya fenomena *flypaper effect* pada keuangan pemerintah daerah (Putra dan Dwirandra, 2015).

Maimunah 2006 mengatakan, fenomena *flypaper effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana perimbangan atau dana transfer yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja atas yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). (Oates, 1999) menyatakan bahwa ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut *flypaper effect* (Halim, Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah, 2009).

Dampak dari fenomena *flypaper effect* salah satunya adalah dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih lagi dari pemerintah pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal Oates, 1999

dalam (Halim, Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah, 2009). Zampeli (1986), fenomena *flypaper effect* sendiri juga terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat khususnya di daerah Winconsin dimana pendapatan Pemerintah Daerah sebesar 47% berasal dari transfer Pemerintah Pusat, di Afrika Selatan sebesar 85%, 67%-95% di Nigeria, dan 70%-90% di Meksiko, di negara berkembang seperti di Indonesia juga mengalami fenomena *flypaper effect*. Para peneliti sebelumnya telah menganalisis dampak *flypaper effect* dan hasilnya berbeda beda. Contohnya (Maimunah, 2006) pernah melakukan pengujian adanya *flypaper effect* pada Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dan diperoleh kesimpulan bahwa adanya *flypaper effect* DAU terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Ferdinan (2013) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Pramuka (2010) juga menyimpulkan terjadinya *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa namun ada pengaruh positif DAU dan PAD tahun berjalan maupun tahun sebelumnya terhadap belanja daerah. (Rahman, 2007) mengindikasikan bahwa *Flypaper Effect* tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi.

Tabel 1.2 Rasio PAD dan DAU Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2001-2012

Tahun	%PAD pada BD	%DAU pada BD
2001	7,9	90
2002	10,2	86,6
2003	10,7	75,2
2004	10,9	79,8
2005	12	81,8
2006	10,6	94,8
2007	10,2	83,1
2008	9,8	76,4
2009	10,2	70,2
2010	10,2	65,2
2011	12,4	61,7
2012	17	62,3
Rata-rata	11	77,2

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Penelitian ini berfokuskan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan perekonomian yang cukup pesat. Dalam kurun waktu 2001- 2012 rasio PAD terhadap belanja daerah rata-rata kurang dari 15%. Kecilnya proporsi PAD terhadap belanja daerah ini mengindikasikan kabupaten/kota di Jawa Timur belum maksimal dalam memanfaatkan sumber-sumber penghasil PAD, seperti peningkatan pajak daerah serta sumber daya alam lainnya. Ini dapat terjadi karena adanya kecenderungan pengharapan transfer dana dari pemerintah pusat, sehingga akan mengurangi kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Ketidakmampuan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pendapatan melalui PAD sendiri menjadikan tuntutan kedepannya dalam menggali potensi fiskal melalui sektor pajak dan retribusi daerah yang mana potensial sebagai sumber PAD. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi dana

perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah serta menunjukkan ada tidaknya *flypaper effect* di kabupaten/kota Jawa Timur Tahun 2009-2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana proporsi DAU terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2017?
- 2) Bagaimana proporsi PAD terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2017?
- 3) Apakah terjadi *flypaper effect* pada belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui proporsi DAU terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2017
- 2) Mengetahui proporsi PAD terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2017
- 3) Apakah terjadi *flypaper effect* pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2017?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang telah dikemukakan maka manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyikapi hubungan keuangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pemerintah kabupaten/kota terutama dari aspek pemberian dana transfer dan kemandirian daerah.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana perilaku pemerintah kabupaten dan kota terhadap kebijakan dana transfer pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten dan kota di tingkat Provinsi se-Indonesia sehingga dapat dijadikan wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sejenis.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir h, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah:

“Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi dengan tujuan untuk memudahkan pemerintah pusat untuk mengkoordinasi setiap daerah dalam pertumbuhan ekonomi dari daerah tersebut terutama dalam peningkatan atau penurunan PAD yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan otonomi daerah (Erlangga Agustino Landiyanto, 2005). UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah* merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pengembangan otonomi daerah pada kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Saragih (2003) dalam (Rahman, 2007) otonomi daerah artinya kebebasan dalam menjalankan ataupun melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan wilayah daerah oleh instansi daerah itu sendiri. Suatu daerah sudah diberi kewenangan utuh dan sepenuhnya untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ada di suatu daerah. Namun dalam pelaksanaan otonomi daerah tetap harus menghormati adanya pemerintahan pusat. Sebab pemerintah pusat adalah pusatnya daerah, dan daerah adalah bagian dari

pusat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Mardiasmo (2002) menjelaskan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian suatu daerah. Konsep otonomi daerah di Indonesia adalah bahwa kewenangan untuk menjalankan fungsi atau mengurus daerah sendiri tidak datang begitu saja, tetapi merupakan keputusan politik yang ditempuh guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan (Saragih, 2005). Pelimpahan tanggung jawab diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2002).

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut (Litvack, 1998) desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Semakin besar suatu negara (dilihat dari penduduk dan luas wilayah) maka biasanya semakin kompleks dan “heterogen” pemerintahannya, yang tercermin dari tingkatan pemerintah daerah. Desentralisasi (dan sentralisasi) adalah cara untuk melakukan penyesuaian tata kelola pemerintahan dimana dilakukan distribusi fungsi pengambilan keputusan dan kontrol.

Berdasarkan dampak atau yang berkaitan dengan layanan publik, desentralisasi dikelompokkan menjadi tiga jenis (Litvack, 1998):

- a. Desentralisasi politik, merupakan pelimpahan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa kewenangan sepenuhnya yang lebih besar yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pada suatu daerah.

- b. Desentralisasi administrasi, merupakan pelimpahan wewenang yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggungjawab atau wewenang tersebut menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- c. Desentralisasi fiskal, merupakan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan atau penerimaan, hak untuk memperoleh transfer pemerintah, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Secara singkat yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan public sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2005). Desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi yang ada di suatu daerah secara maksimal dan memperoleh transfer dari pemerintah pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal.

2.1.3 Perimbangan Keuangan

Dalam Ketentuan Umum UU Nomor 25 Tahun 1999 dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ialah:

“ Suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata acara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.”

Sedangkan yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah:

“Dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Berdasarkan pengertian tersebut, memiliki makna bahwa dana perimbangan merupakan inti dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu system hubungan keuangan yang bersifat vertikal sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah.

Pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sangat perlu dilakukan karena tidak semua wewenang pemerintahan diberikan atau diserahkan kepada pemerintah daerah (pemerintah sub-nasional). Oleh karena itu, kepentingan dan kebutuhan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pusat atau negara juga harus tersedia secara memadai (Saragih, 2005). Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

2.1.4 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 23 Tahun 2014). Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah yang ada. Sumber pendapatan daerah antara lain berasal dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogative pemerintah, pungutan tersebut berdasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung diberikan kepada penggunaannya (Mangkoesobroto, 2007). Pajak Daerah, merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 yang dimaksud dengan Retribusi Daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau umum.

3. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut (Hamroli, 2003), hasil perusahaan milik daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Jenis pendapatan ini meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah, (2) bagian laba lembaga keuangan Bank, (3) bagian laba lembaga keuangan non Bank, (4) bagian laba atas penyertaan modal atau investasi.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/atau jasa oleh daerah.

Rumus perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

B. Dana Perimbangan

Indonesia saat ini masih mengalami beberapa permasalahan yang berkaitan dengan otonomi daerah seperti fiscal gap (celah fiskal) yang merupakan salah satunya. Celah fiskal terjadi dikarenakan adanya kondisi geografis dan kekayaan alam yang beragam serta defferensial potensi daerah. Menurut (Halim, Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah, 2009) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Keuangan Daerah” menjelaskan bahwa Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, dana perimbangan terdiri atas sebagai berikut: (1) Dana Alokasi Umum (DAU), (2) Dana Bagi Hasil (DBH), (3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

1) Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperlihatkan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 25 Tahun 1999, jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 25% dari pendapatan dalam negeri netto

yang ditetapkan dalam APBN. Dari 25 % tersebut dibagi lagi menjadi 90% untuk DAU bagi daerah kabupaten/kota dan 10% untuk DAU bagi daerah provinsi.

Pada dasarnya DAU merupakan salah satu bentuk dari transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang pemanfaatannya dan pengalokasiannya sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan kewenangan luas bagi daerah, maka DAU sebagai salah satu sumber penerimaan daerah seharusnya bersifat sumber sebagai penerimaan pendamping untuk mendukung PAD yang merupakan sumber utama penerimaan daerah (Soekarwo, 2003). Rumus menghitung DAU:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

2) Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun. Rumus yang digunakan dalam menghitung DAK

$$\text{DAK} = \text{PU APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah}$$

Keterangan:

$$\text{PU APBD} = \text{Penerimaan umum APBD (PAD + DAU + (DBH - DBHDR))}$$

3) Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka desentralisasi fiskal. Dana bagi hasil dikelompokkan menjadi dua, antara lain yaitu dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam. Pajak yang dimaksud merupakan Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan, Pajak Penghasilan (PPH). Dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam diperoleh dari sumber daya alam berupa kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, bagian daerah dari PBB ditetapkan 90%, sedangkan 10% sisanya merupakan bagian pemerintahan pusat. Di sisi lain, bagian daerah dari penerimaan BPHTB berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 ditetapkan sebesar 80%, sedangkan sisanya 20% merupakan bagian pemerintah pusat. Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai besarnya bagian daerah dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas), yang masing-masing ditetapkan 15% dan 30%. Sementara itu, penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan, ditetapkan masing-masing sebesar 80%.

$$\text{DBH} = \text{DBH Pajak} + \text{DBH Bukan Pajak}$$

2.1.5 Belanja Daerah

A. Pengertian Belanja Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah artinya adalah semua pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah yang dialokasikan secara adil dan merata untuk pembangunan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

B. Klasifikasi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

a. Klasifikasi menurut urusan pemerintah

Klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas pelayanan umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja menurut urusan pilihan terdiri dari bidang pertanian, kehutanan energi dan sumber daya mineral, pariwisata kelautan dan perikanan perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

b. Klasifikasi belanja menurut fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara, yang terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

c. Klasifikasi belanja menurut organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.

d. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

C. Kelompok Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja daerah menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

A. Kelompok Belanja Tidak Langsung

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja atas kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga uang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

4. Belanja Hibah

Dalam Belanja daerah, belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

5. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah

tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Bantuan Keuntungan

Bantuan Keuntungan merupakan bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

8. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

B. Belanja Langsung

Dalam pasal 36 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Dalam hal ini, Belanja Pegawai yang dimaksud adalah untuk pengeluaran honorarium/gaji dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari (duabelas) 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

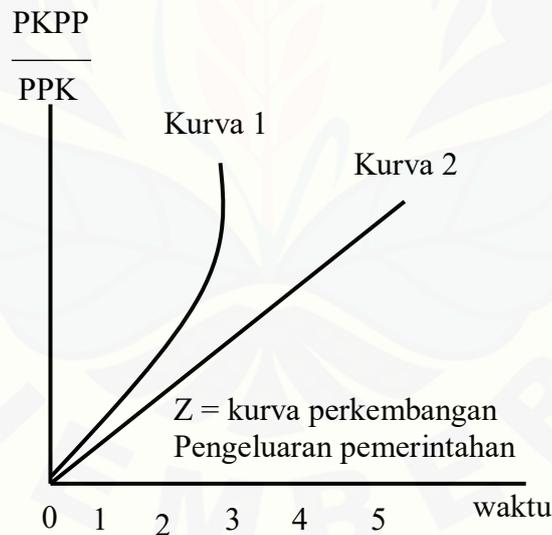
$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Tidak Langsung} + \text{Belanja Langsung}$$

2.1.6 Teori Pengeluaran Pemerintah

A. Teori Wagner

(Mangkoesobroto, 2007) Menjelaskan hukum Wagner adalah bila pendapatan perkapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu:

- a. Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan
- b. Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat
- c. Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi
- d. Perkembangan demografi
- e. Ketidakefisienan birokrasi



Gambar 2.1 Teori Pengeluaran Pemerintah Wagner (Mangkoesobroto, 2007)

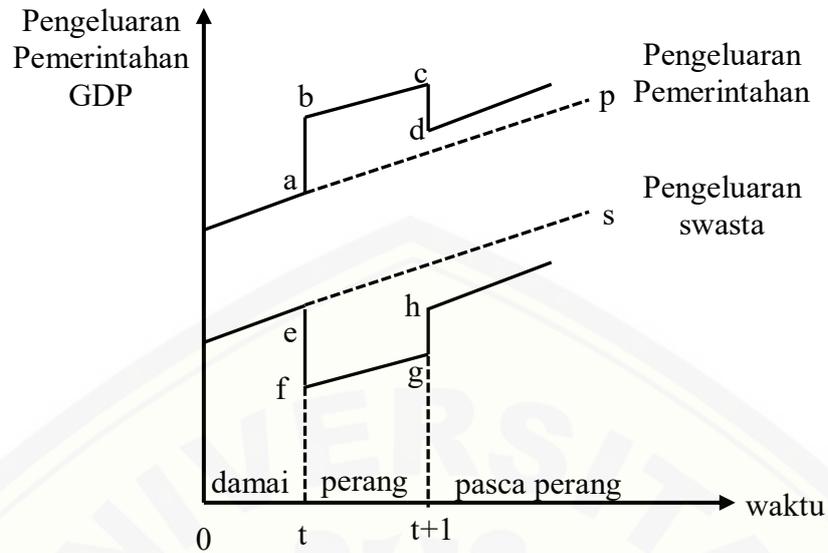
Pada gambar 2.1 dijelaskan kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial dengan kurva berbentuk cembung dan bergerak naik dari kiri bawah menuju kanan atas (Kurva 1), dan bukan seperti kurva 2 yang berbentuk linier. Pada kurva 2 diketahui bahwa tahun kesatu presentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB mengalami peningkatan, hal tersebut juga terjadi di tahun berikutnya, karena itulah kurva pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk

eksponensial. PkPP ialah pengeluaran pemerintah perkapita dan PPK adalah pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk.

B. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman merupakan dua orang yang mengemukakan teori terbaik tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Teori mereka berdasarkan atas pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Saat terjadi perang, pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Hal ini mengakibatkan pemerintah berusaha menaikkan penerimaannya dengan cara menaikkan tariff pajak, namun disisi lain mengakibatkan dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Kondisi tersebut dinamakan efek pengalihan atau *displacement effect* (gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah).

Setelah perang berakhir, pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pajak. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah masih harus mengembalikan bunga pinjaman dan angsuran utang yang digunakan untuk membiayai perang. Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran pemerintah setelah perang meningkat tidak hanya karena GNP naik, tetapi juga karena pengembalian utang dan bunganya. Selain itu, banyak aktifitas pemerintah yang baru terlihat setelah terjadinya perang, hal tersebut dinamakan efek inspeksi atau *inspection effect*. Adanya gangguan sosial akan menyebabkan terjadinya perpindahan konsentrasi kegiatan ekonomi dari tangan swasta ke tangan pemerintah, kemudian disebut dengan efek konsentrasi atau *consentration effect*. Ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah, sehingga setelah terjadinya perang, tingkat pajak tidak turun kembali. Hal ini dapat dilihat pada gambar:

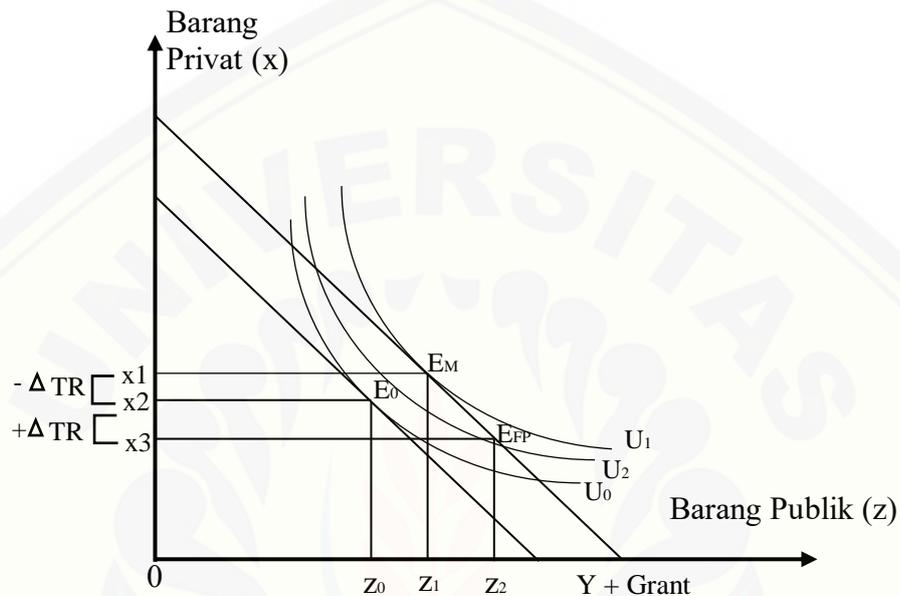


Gambar 1..2 Teori Peacock dan Wiseman (*Mangkoesobroto, 2007*)

2.1.7 Teori Transfer

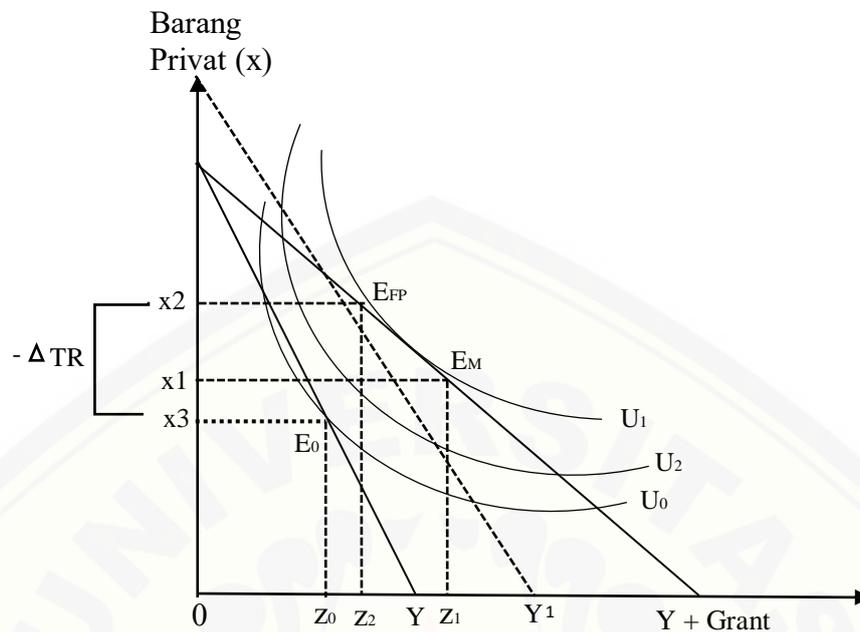
Transfer atau *grant* adalah bentuk dana perimbangan yang substansi dasarnya adalah hibah atau bantuan yang berasal dari level pemerintah yang lebih tinggi kepada level pemerintah yang lebih rendah. Transfer merupakan elemen inti dari keuangan daerah, dan secara substansif tidak dapat dikatakan baik ataupun buruk, karena yang menjadi persoalan adalah terletak pada pengaruhnya terhadap hasil-hasil kebijakan yang dilaksanakan seperti efiseiensi alokasi, pemerataan distribusi, dan stabilitas makroekonomi. Berdasarkan Rosen (1999:497-500) dan Boex (2001:7) dalam (afrizawati, 2012) bahwa bantuan (*grants transfer*) dikelompokkan dalam tiga jenis yang antara lain: (1) Bantuan bersyarat (*conditional grants*), bantuan bersyarat sering disebut juga *categorical grants* atau *specific grants* yang terdiri atas bantuan penyeimbang (*matching grants*) dan bantuan bukan penyeimbang tidak terbatas (*open-ended matching grants*) dan bantuan penyeimbang terbatas (*closed ended matching grants*); (2) bantuan tidak bersyarat (*unconditional grants*), merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa ada syarat tertentu. Artinya, pemerintah daerah dapat menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan kepentingan daerah yang bersangkutan tanpa ada batasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Gambar 2.3 menunjukkan adanya transfer sebesar G memberikan kenaikan garis anggaran dari Y ke $Y+Grant$. Dengan asumsi barang public sebagai barang normal. Transfer yang bersifat umum akan menggeser keseimbangan konsumen dari titik E_0 ke E_M . Pada posisi keseimbangan yang baru tersebut, konsumsi barang publik dan barang privat masing-masing menjadi sebesar Z_1 dan X_1 .



Gambar 2.3 Pengaruh Transfer Tak Bersyarat (Sumber : Kuncoro, 2007)

Sementara gambar 2.4 menunjukkan transfer bersyarat (*conditional grants*) berpengaruh pada konsumsi barang privat melalui efek harga. Transfer tersebut digunakan pemerintah untuk memberikan subsidi untuk setiap unit barang publik sehingga akan menurunkan harga barang publik yang menyebabkan konsumsi barang publik yang menyebabkan konsumsi barang publik mengalami peningkatan dari yang semula Z_0 menjadi Z_1 .



Gambar 2.4 Pengaruh Transfer Bersyarat ((Kuncoro, 2004)

Pengaruh transfer bersyarat pada konsumsi barang privat tergantung pada sensitivitas silangnya. Harga barang publik yang lebih rendah akan meningkatkan konsumsi barang privat apabila pemerintah daerah telah menurunkan tarif pajak. Sebelum ada penurunan tarif pajak, konsumsi barang privat adalah sebesar X₁. Setelah penurunan tarif, konsumsi barang privat meningkat menjadi sebesar X₂. Dengan demikian, kenaikan transfer sebagian berakibat pada kenaikan konsumsi barang publik dan sebagian lagi pada konsumsi barang publik dan sebagian lagi pada konsumsi barang privat secara tidak langsung melalui penurunan tarif pajak.

2.1.8 Flypaper Effect

Istilah *Flypaper effect* diperkenalkan pertama kalinya oleh (Courant, 1974) untuk mengartikulasikan pemikiran Okun (1930) yang menyatakan “*money sticks where it hits*”. Sejauh ini, belum ada padanan kata “*flypaper effect*” dalam bahasa Indonesia sehingga kata ini dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan. Dalam (Iskandar, 2012) dikatakan bahwa *flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (*unconditional grants*) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan asli daerah.

Beberapa peneliti menemukan respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak), ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates (1999) dalam Abdullah dan (Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, 2004) menyatakan bahwa ketika respon pemerintah daerah lebih besar untuk transfer dari pemerintah pusat dibanding pendapatan asli daerahnya sendiri, maka kondisi tersebut disebut *flypaper effect*.

(Kuncoro, 2004) menyatakan bahwa *flypaper effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan transfer tidak bersyarat yaitu DAU dan DBH dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD. Analisis empiris yang mengarah pada *flypaper effect* terletak pada dua prinsip dasar yaitu: (1) model yang menunjukkan bagaimana pemerintah merespon bantuan dana transfer (*grants*) yang digunakan untuk mengukur permintaan pelayanan publik; (2) model median (rata-rata) merupakan model yang dipilih untuk melihat respon transfer per wilayah yang menerima bantuan dana transfer dari pemerintah, dimana pemerintah melihat ada indikasi bahwa dana yang diberikan harus habis untuk dibelanjakan, sehingga anggapan tersebut dapat mempengaruhi pendapatan daerah mereka sendiri.

2.1.9 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah berpengaruh terhadap keuangan daerah yang mendorong dikeluarkannya sejumlah kebijakan terkait dengan transfer antar pemerintahan. Termasuk kebijakan desentralisasi fiskal, agar pemerintah daerah memiliki kewenangan yang semakin kuat dan luas untuk mengelola keuangan pemerintahannya dan meningkatkan kemampuan memperoleh sumber-sumber pendapatan.

Simanjuntak dalam (Siswanto, 2013) menjelaskan salah satu cerminan dari otonomi daerah adalah adanya kewenangan-kewenangan untuk menghimpun pendapatan dari pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Namun, pendapatan asli daerah yang dihimpun oleh pemerintah kabupaten/kota hanya mampu membiayai 20% belanja daerahnya. Rendahnya pencapaian PAD suatu daerah dapat menimbulkan resiko fiskal berupa tidak terpenuhinya seluruh kebutuhan daerah yang telah direncanakan dalam APBD daerah yang bersangkutan. Selain itu meningkatnya belanja daerah tanpa diikuti dengan kenaikan PAD yang signifikan menyebabkan adanya asimetris antara kebutuhan fiskal dan kapitalis fiskal daerah. Gap ini kemudian diharapkan dapat ditutupi oleh transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Konsekuensinya beban pemerintah pusat menjadi semakin meningkat dan pemerintah daerah belum bisa meningkatkan kemandirian daerahnya.

2.1.10 Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah

Sumber penerimaan daerah setelah adanya otonomi daerah saat ini didominasi oleh bantuan dari pemerintah pusat baik dari DAU, DAK, dan DBH. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, tujuan DAU terutama adalah untuk *horizontal equality* dan *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* adalah untuk mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata serta tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antar daerah. Tujuan *sufficiency* (kecukupan) adalah untuk menutup *fiscal gap*.

(Damayanty, 2013) menjelaskan formulasi perhitungan DAU sebagai program transfer yang berbasis pada rumus objektif masih memiliki berbagai keterbatasan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan fiskal secara horizontal. Beberapa diantaranya adalah ‘disintensif’ bagi daerah yang berusaha meningkatkan PAD, serta ‘insentif’ bagi daerah yang memiliki belanja gaji PNSD tinggi. Dengan demikian, semakin besar PAD maka kapasitas fiskal meningkat, celah fiskal menurun, dan berimbas pada menurunnya DAU. Hal tersebut tentunya tidak memberikan stimulus bagi daerah untuk berupaya meningkatkan PAD karena dapat mengandalkan DAU. Selanjutnya, bagi suatu daerah yang DAU nya lebih tinggi daripada PAD nya maka terjadi *flypaper effect*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1	Pramuka, 2010	<i>Flypaper Effect</i> pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa	Variabel: DAU, PAD, dan Belanja Daerah	Alat analisis yang digunakan adalah SPSS pada jurnal Pramuka
2	Ekawarna, 2017	Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran Kab/Kota di Provinsi Jambi)	Variabel yang digunakan sama dengan rencana penelitian	1. Metode yang digunakan adalah OLS pada Ekawarna 2. Lokasi Penelitian
3	Oktavia, 2014	<i>Flypaper Effect</i> : Fenomena Serial Waktu dan Lintas Kab/Kota di Jawa Timur 2003-2013	Variabel dan tempat yang digunakan sama dengan rencana penelitian	1. Perbedaan Tahun 2. Penggunaan metode dynamic OLS pada penelitian
4	Ansharullah Tasri, 2018	<i>The Flypaper Effect Phenomenon: Evidence from Indonesia</i>	Variabel yang digunakan sama dengan rencana penelitian	1. Tempat penelitian 2. Metode analisis menggunakan Generalized Least Square pada Ansharullah

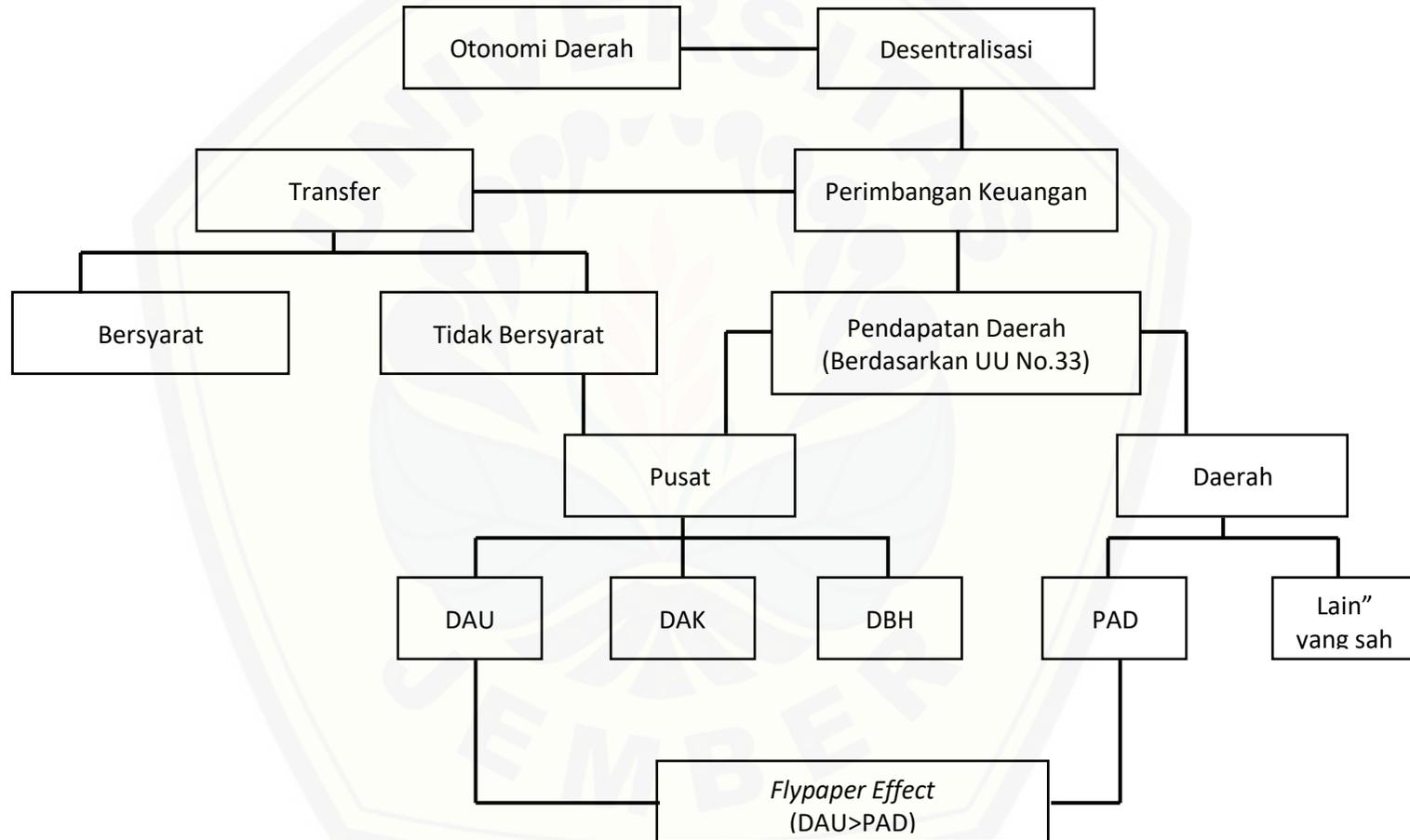
2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Proporsi DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2009-2017.
2. Proporsi PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2009-2017.
3. Terjadi *Flypaper Effect* pada belanja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2009-2017.

2.4 Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang skematis dijelaskan pada Gambar 2.5:



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi empiris di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Desain penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kausal, yang menyangkut hal-hal seperti sebab-akibat, kekuatan, sistem, dan ciri-ciri (Spillane, 2008). Unsur pokok dari sebab-akibat adalah bahwa variabel bebas menghasilkan variabel terikat atau variabel bebas menyebabkan variabel terikat terjadi. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui pengaruh dari PAD dan DAU pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder yang digunakan terdiri dari dua jenis data yaitu data berkala (*time series*) dan data kerat lintang (*cross section*).

Data berkala (*time series*) yaitu data yang didasarkan pada periode terjadinya atau dari waktu ke waktu, pada penelitian ini digunakan selama 8 tahun mulai 2009-2017. Data kerat lintang (*cross section*) adalah data pada tahun tertentu tapi daerahnya berbeda. Daerah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data laporan realisasi APBD dari tahun 2007-2017, yang bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

3.2 Objek Penelitian dan Prosedur Pengumpulan Data

Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi pokok penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2009-2017. Dalam prosedur pengumpulan data yang digunakan ada dua yaitu Riset Kepustakaan dengan cara pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan pebulisan penelitian ini melalui literature atau referensi kepustakaan seperti; ruang baca, Badan Pusat Statistik, serta berbagai sumber penerbitan seperti buku-buku ekonomi yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Selain itu, pengambilan beberapa data tersebut diperoleh melalui

browsing di situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan.

Yang kedua adalah riset lapangan, dimana pengumpulan data dan informasi secara langsung diperoleh melalui instansi dan lembaga yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2009-2017.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan panel *dynamic Ordinary Least Square* (DOLS). Dimana dalam penggunaannya perlu dilakukan uji akar unit dan kointegrasi.

3.3.1 Model dan Analisis Data Panel

Regresi dengan menggunakan data panel disebut regresi data panel. Data panel (*pooled data*) adalah kombinasi dari jenis data runtut waktu (*time series*) dan kerat lintang (*cross section*). Data panel dapat menjelaskan dua macam informasi yaitu mengenai informasi kerat lintang pada perbedaan antar subyek, dan informasi runtut waktu yang merefleksikan perubahan pada subyek waktu. Apabila kedua informasi tersebut sudah tersedia, maka analisis data panel sudah bisa digunakan. Ketika dua jenis data tersebut digabungkan menjadi satu, maka jumlah observasi akan bertambah secara signifikan, tanpa melakukan *treatment* apapun terhadap data. Selain itu, kombinasi tersebut juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data dengan pendekatan yang tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan hanya salah satu dari data tersebut (Gujarati, 2012). Formulasi regresi data panel untuk rumasan masalah pertama pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

BD : Belanja Daerah

PAD : Pendapatan Asli daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

- i : Cross Section
t : Time Series
 β_0 : Konstanta
e : error term

3.3.2 Model dan Metode Analisis *Dynamic Ordinary Least Square (DOLS)*

Dalam konteks analisa fenomena *flypaper effect* terlebih dahulu kita harus memperhitungkan bahwa variabel dependen umumnya tidak stasioner. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel tersebut tidak memiliki nilai rata-rata tetap yang berkaitan dengan waktu, sehingga diperlukan adanya analisis kointegrasi. Pada penelitian ini, peneliti akan mengarah ke metode panel-kointegrasi. Alasan penggunaan metode ini adalah penggunaan teknik OLS normal akan menyebabkan regresi palsu, untuk itu teknik panel-kointegrasi spesifik perlu digunakan. (Chiang, 2000) telah menunjukkan bahwa OLS dalam model panel-kointegrasi adalah asimtotik normal tetapi bias. Metode ini merupakan non-parametrik karena menggunakan kernel estimators dari parameter gangguan yang mempengaruhi distribusi asimtotik estimator OLS. Hal tersebut mengatasi kemungkinan masalah endogenitas dari regresor serta residu autokorelasi. Namun Kao dan (Chiang, 2000) menemukan bahwa dalam sampel yang terbatas estimator *pooled fully modified (FM)* tidak dapat mengoreksi OLS secara umum. Untuk itu digunakan *panel dynamic OLS* yang memiliki keuntungan untuk kenyamanan komputasi. Kao dan Chiang (2000) menjelaskan bahwa panel DOLS mengungguli metode lain pada sampel yang sama, terutama jika disertai dengan *fixed effects*.

Panel DOLS merupakan metode parametrik selain alternatif yang diperkenalkan oleh (Pedroni, 1997), serta (Phillips, 1999) yaitu estimasi data panel dengan *fully modified OLS*. Adanya *fixed effect* dalam regresi kointegrasi merupakan sifat dari panel DOLS. Pada umumnya, vektor kointegrasi adalah homogen, namun metode ini memungkinkan adanya heterogenitas individu dalam jangka pendek, *individual-specific fixed effect*, dan *individual-specific time trends*. Selain itu, metode panel OLS memungkinkan *limited degree of cross-sectional dependence (CSD)* akibat adanya *time-specific effect*. Hasil estimasi panel DOLS

adalah seperangkat koefisien jangka panjang yang berhubungan secara fundamental dengan belanja daerah.

Berdasarkan beberapa metode diatas, berikut adalah persamaan sebuah pendekatan sederhana untuk merumuskan sebuah penduga yang secara asimtot efisien yang menghilangkan pengaruh dalam sistem kointegrasi telah dirancang oleh (Ohta, 2004):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \sum_{P=0}^p X_{it} + \varepsilon^*_{it}$$

Dimana:

Y : variabel independent

X : variabel dependet

β : koefisien

p : lag maksimum

i : tempat

t : waktu

ε : error term

Berdasarkan penelitian ini maka persamaan panel DOLS adalah:

$$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 \sum_{P=0}^p PAD_{it} + \beta_2 \sum_{P=0}^p DAU + \varepsilon^*_{it}$$

Dalam melakukan estimasi menggunakan panel DOLS sebelumnya dilakukan beberapa langkah seperti uji akar unit dan uji kointegrasi.

1. Uji Akar Unit

Uji akar unit dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel stasioner atau tidak. Variabel yang tidak stasioner akan menghasilkan estimasi yang palsu atau dengan kata lain regresi lancung, yakni merupakan kondisi dimana hasil estimasi menunjukkan koefisien regresi yang signifikan dan nilai koefisien determinasi yang tinggi namun hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak saling berhubungan. Penelitian ini menggunakan *Im, Pesaran and Shin (IPS)*, *ADF – Fisher Chi-Square*, dan *PP – Fisher Chi-Square*.

2. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam jangka panjang, yakni terdapat kesamaan pergerakan dan stabilitas hubungan diantara variabel-variabel di dalam penelitian ini atau tidak.

3.4 Uji Statistik

Tujuan dilakukannya uji statistik guna dapat mengetahui besarnya masing-masing koefisien dari variable-variabel bebas yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, dan Pengangguran serta koefisien dari variable terikat yaitu Jumlah penduduk miskin dengan melakukan Uji t-Statistik, dan Uji determinasi berganda (Kisnanto, 2013:21).

1. Uji t-Statistik

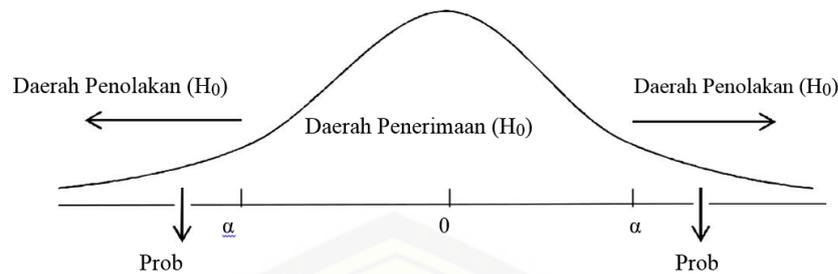
Uji t digunakan untuk menentukan sigifikansi variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis dalam uji statistik ini adalah :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Bila t_0 (t hitung) $>$ t_1 (t tabel), maka hipotesis nol H_0 ditolak dan hipotesis alternative (H_1) diterima artinya model yang digunakan cukup baik dan dapat dikatakan bahwa variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya atau signifikan sebaliknya. Bila t_0 (t hitung) $<$ t_1 (t tabel) maka hipotesis H_0 diterima dan hipotesis alternative H_1 ditolak atau model yang digunakan kurang baik, artinya variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen (tidak signifikan).

Pengujian t-statistik juga dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (uji *p-value*), apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yang ditetapkan berada pada daerah H_1 diterima, maka koefisien parameter dalam model dinyatakan signifikan untuk digunakan.



Gambar 3.1 Kriteria Uji t-Statistik

2. Uji Determinasi Berganda (*Uji R^2*)

Uji Determinasi Berganda (R^2) digunakan untuk mengukur mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain (Singgih, 2005). Besarnya proporsi variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen baik secara simultan atau bersama-sama (R^2) maupun secara parsial atau individual (r^2) dan juga untuk melihat ketetapan garis regresi serta mengukur kemampuan model dalam menjelaskan perubahan variabel independennya. Nilai R^2 berada antara 0-1.

- Koefisien determinasi (R^2) mendekati (1) berarti semakin baik hasil regresi tersebut mewakili data hasil observasi atau semakin kuat variabel bebas dalam menerangkan variabel-variabel terikatnya.
- Koefisien determinasi (R^2) mendekati nol (0) berarti semakin kurang baik hasil regresi tersebut mewakili data hasil observasi atau semakin kurang kuat variabel bebas dalam menerangkan variabel-variabel terikatnya.

Misalnya, $R^2 = 0$ maka model ini tidak dapat menjelaskan sedikitpun variasi dalam variabel tergantung. *Adjusted R^2* adalah koefisien determinasi yang disesuaikan untuk mengetahui besarnya proporsi variasi dalam variabel tergantung yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebasnya secara simultan setelah memperhatikan derajat kebebasannya.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik ini digunakan sebelum melakukan analisis data. Agar tercapai suatu estimasi dalam penelitian ini menggunakan metode *Ordinal Least Square (OLS)* untuk memenuhi syarat seluruh asumsi klasik dinamakan estimasi *Best Linier unbiased estimator (BLUE)* yang merupakan teorema Gauss markov (Wardhono, 2005). Dalam mengestimasi parameter regresi menggunakan tiga uji ekonometrika yaitu uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Normalitas.

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan linier yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel penjelas dalam model regresi. Jika variabel-variabel penjelas berkorelasi secara kuat antara satu sama lain, maka akan sangat sulit untuk memisahkan pengaruh masing-masing variabel penjelas dan untuk mendapatkan penaksiran yang baik bagi koefisien-koefisien regresi. Cara untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas adalah model mempunyai koefisien determinasi (R^2) yang tinggi antara (0,8-1), tetapi tidak satupun atau sedikit sekali variabel bebas yang signifikan mempengaruhi variabel terikat melalui uji. Namun berdasarkan uji F secara statistik signifikan yang berarti semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.

Gejala multikolinieritas dapat dilihat pada *correlation matrix*-nya pada *software Eviews*. Jika koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas lebih dari 0,8 maka multikolinieritas terjadi antara masing-masing variabel. Jika dalam suatu model terdapat multikolinieritas maka akan menimbulkan:

- a. *Standart error* dari koefisien regresi yang dihasilkan akan menjadi lebih besar dengan semakin meningkatnya kolinieritas antar variabel bebas.
- b. Karena *standart error* semakin besar, hal ini akan menimbulkan rentang keyakinan (*confident interval*) bagi parameter yang diduga semakin melebar.
- c. *Confident interval* yang semakin lebar, memperbesar kemungkinan untuk menerima hipotesis yang salah semakin besar.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bisa dilakukan dengan menggunakan uji histogram, uji P plot, uji Chi Square, Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Uji normalitas dilakukan untuk melihat nilai residual normal atau tidak. Model yang baik adalah model memiliki nilai residual normal. Uji normalitas digunakan untuk melihat variabel pengganggu (*disturbance error*) terdistribusi normal atau tidak yakni dengan melakukan uji *Jarque-Berra LM*. Variabel pengganggu yang terdistribusi normal, maka uji t dan uji F dapat dilakukan. Sebaliknya, apabila asumsi normalitas tidak terpenuhi maka inferensi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji F. kriteria pengujian yang dilakukan adalah dengan menghitung nilai *Chi-square* yang didasarkan pada test of skewness dan kurtosis of residual. (Gujarati, 2009; Wardhono, 2005). Apabila *Chi-square* hitung lebih besar dari *Chi-square* tabel maka *disturbance error* dari model terdistribusi normal. Uji normalitas juga dilakukan dengan membandingkan probabilitas *Jarque-Berra* yaitu apabila nilai probabilitas *Jarque-Berra* lebih besar dari α ($\alpha=0,05$) maka variabel pengganggu (*disturbance error*) terdistribusi normal, dan sebaliknya.

3.6 Identifikasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel terikat (*dependent variabel*). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah, sedangkan variabel bebasnya yaitu Dana Perimbangan (DP) yang di prosikan atau difokuskan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, ditulis menggunakan juta rupiah. Penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah tersebut dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah (BUMD), dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur periode 2009-2016.

b. Dana Alokasi Umum

Dana perimbangan adalah salah satu bentuk bantuan dana transfer tak bersyarat dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada analisis dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.

c. Belanja Pemerintah Daerah

Belanja daerah merupakan realisasi belanja yang tertuang dalam APBD pemerintah kabupaten/kota yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Data belanja daerah yang digunakan adalah data belanja pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Satuan hitung untuk belanja daerah adalah juta rupiah serta periode waktu yang digunakan adalah selama 8 tahun yaitu pada 2009-2016.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel PAD berpengaruh positif. Hasil dari analisis juga menunjukkan bahwa adanya hubungan secara simultan dan parsial antara PAD terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio PAD mengalami peningkatan maka juga akan meningkatkan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur
2. Variabel DAU berpengaruh positif. Hasil dari analisis juga menunjukkan bahwa adanya hubungan secara simultan dan parsial antara DAU terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio DAU mengalami kenaikan maka akan meningkatkan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur.
3. Hasil analisis menunjukkan adanya *flypaper effect* pada belanja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2009-2017. Hal tersebut di tunjukkan dengan adanya nilai koefisien DAU yang lebih besar dari pada nilai koefisien PAD. *Flypaper effect* ini menunjukkan bahwa respon belanja pemerintah daerah lebih besar terhadap DAU daripada terhadap PAD itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya superioritas pengetahuan birokrat mengenai adanya dana perimbangan dan adanya rekayasa yang dilakukan pembuat keputusan pada penyesunan anggaran sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada penilaian tertentu.

5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Adanya *flypaper effect* menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menggunakan dana perimbangan khususnya DAU dan DBH yang merupakan transfer tidak bersyarat lebih dominan daripada pendapatan asli daerah untuk melakukan belanja pemerintah daerah. Pemerintah daerah hendaknya lebih meningkatkan PAD salah satunya melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. Pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi belanja dengan mengalokasikan belanja pemerintah daerah maupun dinas-dinas ke belanja modal.
3. Selain upaya dari sisi optimalisasi pendapatan yang tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan keuangan daerah yang sudah ada dikelola dengan baik. Prinsip-prinsip *good cooperate governance* (GCG) harus dilaksanakan secara konsisten sehingga sumberdaya yang dimiliki daerah dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat serta harus dipastikan pelaporan dan penggunaannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- afrizawati. (2012). Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan”, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius), Januari 2012. Palembang. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, 12-15.
- Chiang, K. C. (2000). *Advances in Econometrics: Nonstationary Panels, Panels Cointegration and Dynamic Panels*. Washington DC: Washington DC (US): Center for Economic Policy Research and World Bank.
- Courant. (1974). *The Stimulative Effect of Intergovernment Grants: Or Why Money Stick Where It Hits*. Washington DC: The Urban Institute.
- Damayanty, S. A. (2013). *Menelisik Kemampuan Keuangan Daerah*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Gujarati, D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2009). *Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamroli, H. (2003). *Menghitung Profesi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BPFEE.
- Iskandar. (2012). Flypaper Effect pada Unconditional Grants. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13.
- Kuncoro. (2004). Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.9. *Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*, 10-15.
- Litvack, J. A. (1998). The World Bank. *Decentralization in Developing Country*, 35-37.
- Maimunah, M. (2006). SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI IX PADANG. *Flypaper Effect Pada DAU dan PAD Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra*, 5-7.
- Mangkoesobroto, G. (2007). *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFEE Yogyakarta.
- Ndadari, L. W. (2008, September 6). Prilaku Asimetris Pemerintahan Daerah Terhadap Transfer Pemerintahan Pusat. *The And National Confrence UKWMS Economies*, 50-60.

- Oates, W. (1999). Essay on Fiscal Federalism. *Economic Literature*, 1120-1149.
- Ohta, K. d. (2004). Long-run Matching Relationship in The Japanese Labor Market. *Empirical Economics*, 921-937.
- Pedroni. (1997). Full Modified OLS for heterogeneous Cointegrated Panels and The Case of Purchasing Power Parity. *Departement of Economics, Indiana University*, 15-17.
- Phillips, M. (1999). Linear Regression Limit Theory for Nonstationary Panel Data. *Econometric Riview*, 1057-1111.
- Rahman, K. d. (2007). JAAI Vol. 11. *Flypaper Effect pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia*, 67-80.
- saragih. (2003). *otonomi daerah*, 23.
- Saragih, J. P. (2005). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shah. (1994). The Reform of Intergovernmental Fiscal Relation in Developing and Emerging Market Economies. 42-48.
- Simanjuntak, R. (2001). LPEMUI. *Kebijakan Pengatuaran Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization And Globalization*, 6-7.
- Singgih, S. (2005). *Menguasai Statistik di Era Informasi Dengan SPSS 12*. Jakarta: PT Alex Mdia Komputindo.
- Siswanto, A. (2013). Identifikasi Sumber-Sumber Risiko Fiskal Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 5*, 231-240.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 2004. Jakarta
- _____. *Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2005. Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001. Retribusi Daerah*. Jakarta
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005. Dana Perimbangan*. Jakarta
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta

_____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2000. Pembagian hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta*



LAMPIRAN

Lampiran A. Data Penelitian

Nama Kota	Tahun	BD	PAD	DAU
Kab. Bangkalan	2009	745,722	32,236	478,777
	2010	596,292	35,356	497,594
	2011	1,154,587	44,017	565,946
	2012	1,207,475	62,836	700,513
	2013	1,370,899	83,249	778,024
	2014	1,575,467	101,111	854,874
	2015	1,771,841	122,079	888,673
	2016	2,126,371	165,985	1,012,243
Kab. Banyuwangi	2009	745,722	32,236	478,777
	2010	1,028,576	78,153	761,897
	2011	1,393,229	91,306	815,653
	2012	119,657	1,030,217	1,736,095
	2013	161,976	1,154,495	1,884,252
	2014	208,904	1,254,496	2,221,945
	2015	249,037	1,288,941	2,572,287
	2016	307,163	1,341,343	2,802,183
Kab. Blitar	2009	945,261	52,044	629,882
	2010	847,138	61,999	639,739
	2011	1,157,481	66,516	698,002
	2012	77,036	845,118	1,366,851
	2013	96,053	944,298	1,493,178
	2014	135,078	1,027,252	1,794,968
	2015	176,939	1,037,911	2,065,949
	2016	195,222	1,128,511	2,537,048
Kab. Bojonegoro	2009	1,048,219	59,079	596,44

	2010	7,826,710	73,2	583,764
	2011	1,381,308	93,164	665,54
	2012	135,697	785,585	1,679,631
	2013	195,973	876,022	2,145,136
	2014	196,055	920,522	2,418,394
	2015	262,952	895,987	2,985,670
	2016	290,865	949,118	3,864,897
	2017	298,311	989,343	3,904,352
Kab. Bondowoso	2009	689,633	30,356	455,451
	2010	755,125	46,483	479,82
	2011	754,375	50,556	540,205
	2012	985,851	57,78	666,857
	2013	67,784	752,777	1,160,729
	2014	84,852	826,284	1,390,182
	2015	122,174	862,6	1,609,754
	2016	138,315	926,596	1,971,859
	2017	153,422	998,532	199,543
Kab. Gresik	2009	135,638	511,333	993,531
	2010	160,961	513,482	1,299,239
	2011	231,698	561,391	1,227,695
	2012	325,315	711,868	1,474,708
	2013	423,217	804,904	1,810,426
	2014	636,489	863,398	2,200,520
	2015	842,197	873,266	2,565,135
	2016	924,976	923,469	2,933,645
	2017	942,214	952,353	3,013,311
Kab. Jember	2009	1,289,619	108,808	940,413
	2010	925,616	146,453	955,007
	2011	1,813,845	180,266	1,059,232
	2012	2,115,511	211,618	1,279,296
	2013	2,401,429	290,135	1,417,604
	2014	2,760,337	460,927	1,539,723

	2015	3,129,288	508,051	1,586,837
	2016	3,547,033	485,082	1,709,893
	2017	3,765,564	502,435	1,834,131
Kab. Jombang	2009	917,777	79,598	601,46
	2010	1,044,931	100,571	606,943
	2011	1,088,394	105,048	664,825
	2012	1,273,933	117,508	809,296
	2013	1,444,127	143,932	920,098
	2014	1,821,852	205,761	1,007,166
	2015	2,097,689	256,126	1,032,325
	2016	2,479,301	309,51	1,111,301
	2017	2,543,3523	312,423	1,124,337
Kab. Kediri	2009	1,037,182	50,676	701,513
	2010	698,582	62,318	693,062
	2011	1,276,111	59,636	750,629
	2012	1,552,078	83,052	925,533
	2013	1,699,769	126,027	1,056,481
	2014	2,002,837	190,158	1,144,879
	2015	2,357,483	272,923	1,177,392
	2016	2,889,597	291,775	1,242,231
	2017	2,934,352	301,312	1,433,434
Kab. Lamongan	2009	902,05	66,156	581,728
	2010	1,043,303	94,066	606,7
	2011	1,213,856	103,336	680,162
	2012	1,432,606	108,606	832,016
	2013	1,550,103	124,606	958,345
	2014	1,768,378	178,89	1,042,125
	2015	2,196,879	266,767	1,064,301
	2016	2,574,567	317,13	1,166,656
	2017	2,765,434	324,454	1,244,435
Kab. Lumajang	2009	784,568	58,079	534,218
	2010	1,399,143	66,052	557,173

	2011	1,114,860	76,101	606,141
	2012	1,165,502	87,054	736,273
	2013	1,445,311	107,282	828,525
	2014	1,561,608	117,29	898,218
	2015	1,893,959	170,243	923,492
	2016	2,114,909	177,205	990,248
	2017	2,324,342	184,231	1,034,234
Kab. Madiun	2009	663,773	32,754	463,561
	2010	951,699	35,958	476,031
	2011	938,11	49,802	523,294
	2012	1,029,393	57,699	645,865
	2013	1,165,411	65,989	734,152
	2014	1,309,108	100,463	808,843
	2015	1,521,303	128,676	832,357
	2016	1,839,034	151,441	893,566
	2017	1,980,443	176,465	980,345
Kab. Magetan	2009	725,583	38,248	489,562
	2010	1,100,249	45	503,708
	2011	859,498	55,262	546,569
	2012	1,036,619	61,157	677,454
	2013	1,190,679	74,5	761,637
	2014	1,403,497	112,759	840,087
	2015	1,591,866	122,84	856,279
	2016	1,858,000	145,8	916,052
	2017	1,980,545	165,53	932,324
Kab. Malang	2009	1,509,171	103,389	959,115
	2010	942,04	124,389	967,107
	2011	1,821,834	126,027	1,049,562
	2012	2,157,429	154,258	1,281,613
	2013	2,385,081	192,761	1,439,234
	2014	2,834,457	255,198	1,572,192
	2015	3,302,969	333,189	1,613,162

	2016	3,261,552	394,872	1,613,162
	2017	3,432,344	421,123	1,874,532
Kab. Mojokerto	2009	774,221	50,332	502,177
	2010	820,186	62,87	529,762
	2011	941,352	78,828	598,972
	2012	1,165,492	107,074	733,782
	2013	1,326,988	190,236	832,267
	2014	1,762,334	302,841	899,109
	2015	2,225,694	400,009	923,748
	2016	2,360,965	413,772	991,18
	2017	2,389,533	454,543	1,390,532
Kab. Nganjuk	2009	924,019	61,381	590,835
	2010	692,374	71,846	598,046
	2011	1,054,066	84,521	669,917
	2012	1,207,703	98,689	827,299
	2013	1,621,852	118,057	928,266
	2014	1,625,317	201,045	1,004,038
	2015	2,113,410	237,474	1,024,223
	2016	2,525,472	280,809	1,078,696
	2017	2,653,532	298,345	1,135,799
Kab. Ngawi	2009	714,545	19,233	555,625
	2010	729,724	26,562	572,965
	2011	1,041,016	35,314	654,72
	2012	1,112,731	51,643	796,834
	2013	1,298,105	74,198	896,053
	2014	1,479,305	100,69	980,53
	2015	1,765,878	138,774	995,119
	2016	2,156,709	161,922	1,058,208
	2017	2,432,132	173,423	1,213,532
Kab. Pacitan	2009	644,568	26,221	429,143
	2010	1,572,407	25,217	435,691
	2011	753,953	34,384	480,825

	2012	898,281	44,997	589,83
	2013	974,152	57,171	647,293
	2014	1,110,749	67,334	700,743
	2015	1,269,623	89,47	714,847
	2016	1,549,555	109,873	807,908
	2017	1,598,535	123,435	890,453
Kab. Pamekasan	2009	686,926	33,426	458,24
	2010	806,002	38,147	475,711
	2011	982,75	45,687	513,549
	2012	1,112,615	56,161	625,873
	2013	1,262,203	67,761	702,61
	2014	1,454,660	83,821	788,618
	2015	1,803,972	125,126	817,904
	2016	2,035,009	142,771	862,936
	2017	2,233,439	153,858	895,359
Kab. Pasuruan	2009	1,018,625	72,3	606,163
	2010	907,631	87,686	636,119
	2011	1,414,171	125,427	714,59
	2012	1,581,766	152,01	876,732
	2013	1,894,773	198,793	992,689
	2014	2,190,622	296,721	1,068,869
	2015	2,473,274	372,454	1,089,359
	2016	3,372,298	452,457	1,200,612
	2017	3,535,235	465,355	1,356,654
Kab. Ponorogo	2009	802,959	41,582	550,746
	2010	832,663	49,777	563,868
	2011	1,107,693	52,712	634,712
	2012	1,240,263	77,382	779,078
	2013	1,366,718	97,509	890,922
	2014	1,646,647	128,121	970,788
	2015	1,890,939	177,248	993,319
	2016	2,253,555	212,72	1,062,583

	2017	2,435,453	243,352	1,432,352
Kab. Probolinggo	2009	740,3	36,11	537,651
	2010	618,192	37,294	568,85
	2011	1,049,331	47,796	639,207
	2012	1,276,919	70,908	761,57
	2013	1,355,852	86,53	848,994
	2014	1,588,223	127,942	929,381
	2015	1,912,891	163,832	956,97
	2016	2,117,397	201,794	977,57
	2017	2,123,241	234,96	1,034,408
Kab. Sampang	2009	790,285	30,46	428,946
	2010	786,42	35,12	454,854
	2011	749,437	40,506	499,762
	2012	1,024,721	52,287	603,996
	2013	1,181,911	63,041	683,243
	2014	1,211,114	77,697	753,954
	2015	1,474,017	121,298	788,345
	2016	1,832,100	120,965	827,953
	2017	1,908,435	143,45	867,435
Kab. Sidoarjo	2009	1,353,230	252,593	666,166
	2010	1,126,236	288,732	666,336
	2011	1,823,870	393,766	759,044
	2012	2,189,901	597,756	974,571
	2013	2,581,880	721,795	1,104,580
	2014	2,897,821	919,706	1,199,036
	2015	3,690,881	1,090,576	1,206,660
	2016	3,993,515	1,203,783	1,225,261
	2017	4,098,509	1,376,352	1,498,432
Kab. Situbondo	2009	614,266	32,018	433,451
	2010	855,121	36,44	447,61
	2011	866,162	50,801	516,045
	2012	983,044	57,03	616,094

	2013	1,136,683	67,498	692,549
	2014	1,381,318	101,695	766,543
	2015	1,549,389	125,964	787,729
	2016	1,709,130	163,808	821,084
	2017	1,869,322	187,433	989,324
Kab. Sumenep	2009	952,512	38,332	565,851
	2010	768,209	37,94	580,852
	2011	1,092,435	47,385	664,76
	2012	1,308,070	69,787	807,976
	2013	1,518,730	91,137	917,539
	2014	1,683,522	115,498	984,839
	2015	2,012,685	166,654	1,010,159
	2016	2,229,987	169,033	1,110,488
	2017	2,345,454	189,574	1,434,243
Kab. Trenggalek	2009	689,093	34,254	465,955
	2010	743,014	50,622	472,36
	2011	931,337	61,066	535,503
	2012	1,039,168	67,278	654,343
	2013	1,043,299	80,965	737,815
	2014	1,189,303	109,185	815,508
	2015	1,618,457	124,094	839,498
	2016	1,839,360	142,21	901,38
	2017	1,909,878	175,876	913,344
Kab. Tuban	2009	871,391	75,546	520,028
	2010	1,548,894	73,74	541,454
	2011	1,102,329	92,13	606,248
	2012	1,342,317	119,9	757,907
	2013	1,517,459	185,415	849,399
	2014	1,692,246	205,17	926,685
	2015	1,935,787	260,939	955,94
	2016	2,240,158	300,385	1,046,759
	2017	2,355,535	302,242	1,232,432

Kab. Tulungagung	2009	866,251	55,657	625,049
	2010	690,65	70,955	648,991
	2011	1,065,530	86,404	724,035
	2012	1,354,884	110,503	878,221
	2013	1,408,195	121,703	996,301
	2014	1,583,425	182,445	1,083,859
	2015	2,213,020	213,01	1,111,457
	2016	2,417,755	240,483	1,172,558
Kota Blitar	2009	336,55	32,802	225,704
	2010	922,829	40,838	223,964
	2011	450,197	49,118	250,236
	2012	503,07	54,987	315,773
	2013	579,383	56,37	355,673
	2014	634,078	75,235	392,222
	2015	782,717	82,436	400,654
	2016	839,55	108,171	428,744
Kota Kediri	2009	614,385	73,445	408,256
	2010	718,753	77,667	421,79
	2011	688,501	88,275	399,398
	2012	837,602	101,474	490,372
	2013	953,26	126,965	562,943
	2014	1,153,826	137,461	634,352
	2015	1,521,303	128,676	832,357
	2016	1,509,853	191,732	617,781
Kota Madiun	2009	392,381	23,413	272,311
	2010	871,391	28,146	271,396
	2011	492,142	38,038	297,864
	2012	602,343	46,554	413,004
	2013	744,119	55,684	474,093

	2014	831,055	85,74	511,09
	2015	989,474	111,379	509,817
	2016	1,305,219	132,435	511,357
	2017	1,354,456	156,453	534,532
Kota Malang	2009	784,043	86,501	471,748
	2010	1,017,355	101,519	494,911
	2011	1,010,799	158,447	533,804
	2012	1,261,071	175,985	665,928
	2013	1,543,987	262,741	746,687
	2014	1,683,670	336,246	808,448
	2015	1,803,147	353,428	818,759
	2016	1,842,131	379,847	870,362
	2017	1,986,353	412,122	898,567
Kota Mojokerto	2009	419,278	21,081	238,05
	2010	351,429	29,519	244,97
	2011	426,346	34,633	265,655
	2012	487,642	48,056	309,103
	2013	571,109	60,806	354,452
	2014	648,104	73,241	380,78
	2015	815,212	92,842	382,374
	2016	1,007,723	122,037	397,094
	2017	1,232,455	143,532	401,324
Kota Pasuruan	2009	440,506	25,617	230,765
	2010	637,485	34,614	231,964
	2011	453,029	30,532	264,131
	2012	462,241	33,207	319,425
	2013	529,985	51,343	353,128
	2014	702,748	69,23	391,843
	2015	840,772	92,731	399,095
	2016	852,672	110,876	432,09
	2017	987,533	156,564	546,654
Kota Probolinggo	2009	458,255	36,087	259,539

	2010	430,226	40,071	268,393
	2011	579,909	56,619	311,527
	2012	597,984	60,446	367,601
	2013	672,445	73,521	414,534
	2014	783,247	80,748	454,208
	2015	894,026	108,621	463,65
	2016	1,096,732	130,171	470,213
	2017	1,212,323	154,454	490,536
Kota Surabaya	2009	4,029,855	864,083	765,895
	2010	844,476	1,036,167	652,532
	2011	5,195,102	2,139,626	679,45
	2012	5,167,057	2,353,325	1,061,626
	2013	5,720,099	2,570,794	1,160,026
	2014	6,636,187	2,953,981	1,200,889
	2015	7,269,443	3,520,137	1,147,385
	2016	7,939,075	3,839,158	1,233,380
	2017	8,213,244	3,908,424	1,324,535
Kota Batu	2009	390,606	22,581	218,141
	2010	399,649	30	232,146
	2011	450,502	30	290,823
	2012	482,785	31,494	324,769
	2013	565,765	39,249	374,362
	2014	761,572	59,856	412,378
	2015	914,834	80,15	413,22
	2016	878,928	118,739	480,46
	2017	897,698	124,463	547,468

Lampiran B. Hasil Analisis**Uji Akar Unit Tingkat *Level*****Variabel Belanja Daerah**

Panel unit root test: Summary

Series: BD

Date: 02/16/19 Time: 13:42

Sample: 2009 2016

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Method	Statistic	Prob.**	Cross- sections	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)				
Levin, Lin & Chu t*	-36.5206	0.0000	38	246
Null: Unit root (assumes individual unit root process)				
Im, Pesaran and Shin W-stat	-3.30117	0.0005	38	246
ADF - Fisher Chi-square	44.6975	0.9984	38	246
PP - Fisher Chi-square	22.2557	1.0000	38	266

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Variabel Pendapatan Asli Daerah

Panel unit root test: Summary

Series: PAD

Date: 02/16/19 Time: 13:45

Sample: 2009 2016

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Method	Statistic	Prob.**	Cross- sections	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)				
Levin, Lin & Chu t*	13.2033	1.0000	38	257
Null: Unit root (assumes individual unit root process)				
Im, Pesaran and Shin W-stat	12.8028	1.0000	38	257
ADF - Fisher Chi-square	9.99800	1.0000	38	257
PP - Fisher Chi-square	3.69525	1.0000	38	266

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Variabel Dana Alokasi Umum

Panel unit root test: Summary

Series: DAU

Date: 02/16/19 Time: 13:47

Sample: 2009 2016

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Method	Statistic	Prob.**	Cross- sections	Obs
--------	-----------	---------	--------------------	-----

Null: Unit root (assumes common unit root process)

Levin, Lin & Chu t*	-6.14331	0.0000	38	255
---------------------	----------	--------	----	-----

Null: Unit root (assumes individual unit root process)

Im, Pesaran and Shin W-stat	3.83661	0.9999	38	255
ADF - Fisher Chi-square	39.2048	0.9999	38	255
PP - Fisher Chi-square	8.54902	1.0000	38	266

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Unit Akar Unit Tingkat *First Difference*

Variabel Belanja Daerah

Panel unit root test: Summary

Series: D(BD)

Date: 02/16/19 Time: 13:45

Sample: 2009 2016

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Balanced observations for each test

Method	Statistic	Prob.**	Cross-sections	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)				
Levin, Lin & Chu t*	-27.1977	0.0000	38	228

Null: Unit root (assumes individual unit root process)

Im, Pesaran and Shin W-stat	-9.39041	0.0000	38	228
ADF - Fisher Chi-square	239.118	0.0000	38	228
PP - Fisher Chi-square	280.402	0.0000	38	228

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Variabel Pendapatan Asli Daerah

Panel unit root test: Summary

Series: D(PAD)

Date: 02/16/19 Time: 13:46

Sample: 2009 2016

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Balanced observations for each test

Method	Statistic	Prob.**	Cross-sections	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)				
Levin, Lin & Chu t*	-6.99222	0.0000	38	228
Null: Unit root (assumes individual unit root process)				
Im, Pesaran and Shin W-stat	-0.70751	0.2396	38	228
ADF - Fisher Chi-square	86.9743	0.1830	38	228
PP - Fisher Chi-square	94.9693	0.0695	38	228

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Variabel Dana Alokasi Umum

Panel unit root test: Summary

Series: D(DAU)

Date: 02/16/19 Time: 13:48

Sample: 2009 2016

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Balanced observations for each test

Method	Statistic	Prob.**	Cross- sections	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)				
Levin, Lin & Chu t*	-7.19951	0.0000	38	228
Null: Unit root (assumes individual unit root process)				
Im, Pesaran and Shin W-stat	-2.29185	0.0110	38	228
ADF - Fisher Chi-square	108.241	0.0089	38	228
PP - Fisher Chi-square	126.935	0.0002	38	228

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Uji Kointegrasi

1. Pedroni (No Deterministic Trend)

Pedroni Residual Cointegration Test

Series: BD PAD DAU

Date: 01/17/19 Time: 19:49

Sample: 2009 2016

Included observations: 304

Cross-sections included: 38

Null Hypothesis: No cointegration

Trend assumption: No deterministic trend

Automatic lag length selection based on SIC with a max lag of 0

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)

	<u>Statistic</u>	<u>Prob.</u>	Weighted	
			<u>Statistic</u>	<u>Prob.</u>
Panel v-Statistic	-3.481438	0.9998	-2.762288	0.9971
Panel rho-Statistic	-2.375950	0.0088	0.311565	0.6223
Panel PP-Statistic	-38.38240	0.0000	-21.03672	0.0000
Panel ADF-Statistic	-30.03211	0.0000	-13.32289	0.0000

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)

	<u>Statistic</u>	<u>Prob.</u>
Group rho-Statistic	3.067873	0.9989
Group PP-Statistic	-26.05473	0.0000
Group ADF-Statistic	-18.26531	0.0000

Cross section specific results

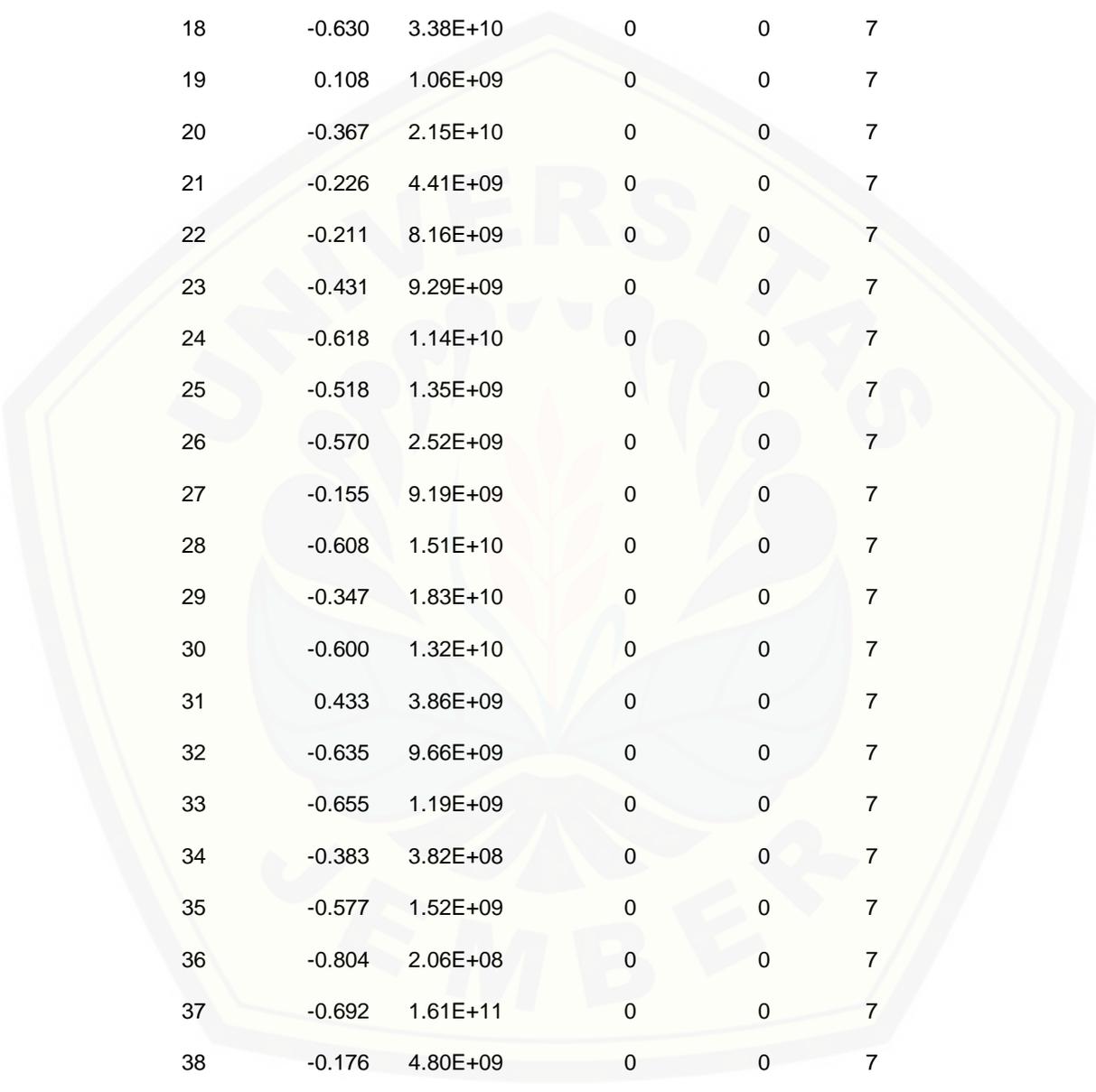
Phillips-Peron results (non-parametric)

Cross ID	AR(1)	Variance	HAC	Bandwidth	Obs
1	-0.486	9.95E+09	1.57E+09	6.00	7
2	-0.103	1.62E+10	1.62E+10	0.00	7
3	-0.530	5.79E+09	2.04E+09	6.00	7
4	-0.639	1.64E+12	1.05E+12	5.00	7
5	-0.052	3.66E+09	3.66E+09	0.00	7
6	-0.469	1.13E+09	4.97E+08	6.00	7
7	-0.431	2.85E+10	9.58E+09	6.00	7
8	-0.374	2.88E+08	72614777	6.00	7
9	-0.331	3.11E+10	7.91E+09	6.00	7
10	0.229	2.32E+09	6.13E+08	6.00	7
11	-0.533	1.17E+10	9.25E+09	4.00	7
12	-0.436	3.68E+09	4.09E+09	1.00	7
13	-0.646	5.71E+09	2.18E+09	6.00	7
14	-0.576	2.72E+10	9.69E+09	6.00	7
15	0.031	4.20E+09	7.87E+08	6.00	7
16	-0.539	1.75E+10	7.50E+09	6.00	7
17	-0.188	6.36E+09	1.28E+09	6.00	7
18	-0.630	3.38E+10	2.33E+10	4.00	7
19	0.108	1.06E+09	1.06E+09	0.00	7
20	-0.367	2.15E+10	6.01E+09	6.00	7
21	-0.226	4.41E+09	9.25E+08	6.00	7
22	-0.211	8.16E+09	1.42E+09	6.00	7
23	-0.431	9.29E+09	4.04E+09	6.00	7
24	-0.618	1.14E+10	3.08E+09	6.00	7
25	-0.518	1.35E+09	1.14E+09	3.00	7
26	-0.570	2.52E+09	1.63E+09	6.00	7

27	-0.155	9.19E+09	2.48E+09	6.00	7
28	-0.608	1.51E+10	1.51E+10	0.00	7
29	-0.347	1.83E+10	5.12E+09	6.00	7
30	-0.600	1.32E+10	5.45E+09	6.00	7
31	0.433	3.86E+09	4.26E+09	2.00	7
32	-0.635	9.66E+09	4.20E+09	6.00	7
33	-0.655	1.19E+09	1.02E+09	2.00	7
34	-0.383	3.82E+08	8.09E+08	2.00	7
35	-0.577	1.52E+09	8.86E+08	6.00	7
36	-0.804	2.06E+08	1.30E+08	1.00	7
37	-0.692	1.61E+11	1.61E+11	0.00	7
38	-0.176	4.80E+09	1.67E+09	5.00	7

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)

Cross ID	AR(1)	Variance	Lag	Max lag	Obs
1	-0.486	9.95E+09	0	0	7
2	-0.103	1.62E+10	0	0	7
3	-0.530	5.79E+09	0	0	7
4	-0.639	1.64E+12	0	0	7
5	-0.052	3.66E+09	0	0	7
6	-0.469	1.13E+09	0	0	7
7	-0.431	2.85E+10	0	0	7
8	-0.374	2.88E+08	0	0	7
9	-0.331	3.11E+10	0	0	7
10	0.229	2.32E+09	0	0	7
11	-0.533	1.17E+10	0	0	7
12	-0.436	3.68E+09	0	0	7
13	-0.646	5.71E+09	0	0	7



14	-0.576	2.72E+10	0	0	7
15	0.031	4.20E+09	0	0	7
16	-0.539	1.75E+10	0	0	7
17	-0.188	6.36E+09	0	0	7
18	-0.630	3.38E+10	0	0	7
19	0.108	1.06E+09	0	0	7
20	-0.367	2.15E+10	0	0	7
21	-0.226	4.41E+09	0	0	7
22	-0.211	8.16E+09	0	0	7
23	-0.431	9.29E+09	0	0	7
24	-0.618	1.14E+10	0	0	7
25	-0.518	1.35E+09	0	0	7
26	-0.570	2.52E+09	0	0	7
27	-0.155	9.19E+09	0	0	7
28	-0.608	1.51E+10	0	0	7
29	-0.347	1.83E+10	0	0	7
30	-0.600	1.32E+10	0	0	7
31	0.433	3.86E+09	0	0	7
32	-0.635	9.66E+09	0	0	7
33	-0.655	1.19E+09	0	0	7
34	-0.383	3.82E+08	0	0	7
35	-0.577	1.52E+09	0	0	7
36	-0.804	2.06E+08	0	0	7
37	-0.692	1.61E+11	0	0	7
38	-0.176	4.80E+09	0	0	7

2. Pedroni (Deterministic Intercept and Trend)

Pedroni Residual Cointegration Test

Series: BD PAD DAU

Date: 02/16/19 Time: 13:08

Sample: 2009 2016

Included observations: 304

Cross-sections included: 38

Null Hypothesis: No cointegration

Trend assumption: Deterministic intercept and trend

Automatic lag length selection based on SIC with a max lag of 0

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)

	<u>Statistic</u>	<u>Prob.</u>	Weighted	
			<u>Statistic</u>	<u>Prob.</u>
Panel v-Statistic	-7.074785	1.0000	-6.080144	1.0000
Panel rho-Statistic	1.621736	0.9476	3.270018	0.9995
Panel PP-Statistic	-36.30478	0.0000	-26.41513	0.0000
Panel ADF-Statistic	-26.20464	0.0000	-14.62092	0.0000

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)

	<u>Statistic</u>	<u>Prob.</u>
Group rho-Statistic	5.683200	1.0000
Group PP-Statistic	-28.75947	0.0000
Group ADF-Statistic	-15.92265	0.0000

Cross section specific results

Phillips-Peron results (non-parametric)

Cross ID	AR(1)	Variance	HAC	Bandwidth	Obs
1	-0.576	7.67E+09	1.61E+09	6.00	7
2	-0.135	2.99E+09	3.66E+09	1.00	7
3	-0.688	1.55E+09	1.55E+09	0.00	7
4	-0.650	1.81E+12	9.01E+11	6.00	7
5	-0.502	1.14E+09	2.40E+08	6.00	7
6	-0.445	1.01E+09	6.17E+08	6.00	7
7	-0.594	1.56E+10	1.09E+10	6.00	7
8	-0.454	2.72E+08	73175938	6.00	7
9	-0.489	1.98E+10	1.17E+10	6.00	7
10	0.037	2.14E+09	3.89E+08	6.00	7
11	-0.467	1.49E+10	3.76E+09	6.00	7
12	-0.553	2.97E+09	9.18E+08	6.00	7
13	-0.593	6.91E+09	1.76E+09	6.00	7
14	-0.578	2.70E+10	9.77E+09	6.00	7
15	-0.322	2.23E+09	7.46E+08	6.00	7
16	-0.527	1.50E+10	9.45E+09	6.00	7
17	-0.579	3.29E+09	1.34E+09	6.00	7
18	-0.639	4.11E+10	1.50E+10	6.00	7
19	-0.724	42118198	20665484	5.00	7
20	-0.267	2.26E+10	5.07E+09	6.00	7
21	-0.694	1.58E+09	6.50E+08	6.00	7
22	-0.361	6.49E+09	1.44E+09	6.00	7
23	-0.387	9.11E+09	4.06E+09	6.00	7
24	-0.620	1.13E+10	3.10E+09	6.00	7
25	-0.237	1.89E+09	3.98E+08	6.00	7
26	-0.503	3.18E+09	1.25E+09	6.00	7

27	-0.177	6.81E+09	3.92E+09	6.00	7
28	-0.682	1.51E+10	5.07E+09	6.00	7
29	-0.379	1.48E+10	6.73E+09	6.00	7
30	-0.482	1.71E+10	3.63E+09	6.00	7
31	0.434	3.86E+09	4.26E+09	2.00	7
32	-0.565	1.28E+10	2.98E+09	6.00	7
33	-0.619	1.55E+09	7.65E+08	6.00	7
34	-0.632	3.47E+08	3.07E+08	5.00	7
35	-0.539	1.76E+09	7.13E+08	6.00	7
36	-0.885	1.90E+08	99750180	3.00	7
37	-0.226	2.55E+11	3.51E+11	1.00	7
38	-0.009	2.43E+09	2.05E+09	3.00	7

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)

Cross ID	AR(1)	Variance	Lag	Max lag	Obs
1	-0.576	7.67E+09	0	0	7
2	-0.135	2.99E+09	0	0	7
3	-0.688	1.55E+09	0	0	7
4	-0.650	1.81E+12	0	0	7
5	-0.502	1.14E+09	0	0	7
6	-0.445	1.01E+09	0	0	7
7	-0.594	1.56E+10	0	0	7
8	-0.454	2.72E+08	0	0	7
9	-0.489	1.98E+10	0	0	7
10	0.037	2.14E+09	0	0	7
11	-0.467	1.49E+10	0	0	7
12	-0.553	2.97E+09	0	0	7
13	-0.593	6.91E+09	0	0	7



14	-0.578	2.70E+10	0	0	7
15	-0.322	2.23E+09	0	0	7
16	-0.527	1.50E+10	0	0	7
17	-0.579	3.29E+09	0	0	7
18	-0.639	4.11E+10	0	0	7
19	-0.724	42118198	0	0	7
20	-0.267	2.26E+10	0	0	7
21	-0.694	1.58E+09	0	0	7
22	-0.361	6.49E+09	0	0	7
23	-0.387	9.11E+09	0	0	7
24	-0.620	1.13E+10	0	0	7
25	-0.237	1.89E+09	0	0	7
26	-0.503	3.18E+09	0	0	7
27	-0.177	6.81E+09	0	0	7
28	-0.682	1.51E+10	0	0	7
29	-0.379	1.48E+10	0	0	7
30	-0.482	1.71E+10	0	0	7
31	0.434	3.86E+09	0	0	7
32	-0.565	1.28E+10	0	0	7
33	-0.619	1.55E+09	0	0	7
34	-0.632	3.47E+08	0	0	7
35	-0.539	1.76E+09	0	0	7
36	-0.885	1.90E+08	0	0	7
37	-0.226	2.55E+11	0	0	7
38	-0.009	2.43E+09	0	0	7

3. Pedroni (No Deterministic Intercept or Trend)

Pedroni Residual Cointegration Test

Series: BD PAD DAU

Date: 02/16/19 Time: 13:12

Sample: 2009 2016

Included observations: 304

Cross-sections included: 38

Null Hypothesis: No cointegration

Trend assumption: No deterministic intercept or trend

Automatic lag length selection based on SIC with a max lag of 0

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

 Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)

	<u>Statistic</u>	<u>Prob.</u>	Weighted	
			<u>Statistic</u>	<u>Prob.</u>
Panel v-Statistic	-2.343643	0.9905	-1.649874	0.9505
Panel rho-Statistic	-0.656460	0.2558	0.121884	0.5485
Panel PP-Statistic	-4.067478	0.0000	-3.731638	0.0001
Panel ADF-Statistic	-4.083719	0.0000	-3.962488	0.0000

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)

	<u>Statistic</u>	<u>Prob.</u>
Group rho-Statistic	2.798848	0.9974
Group PP-Statistic	-10.15289	0.0000
Group ADF-Statistic	-8.076933	0.0000

Cross section specific results

Phillips-Peron results (non-parametric)

Cross ID	AR(1)	Variance	HAC	Bandwidth	Obs
1	-0.434	1.09E+10	2.05E+09	6.00	7
2	0.731	5.06E+10	5.96E+10	1.00	7
3	0.844	5.09E+10	6.36E+10	1.00	7
4	0.181	7.92E+12	7.92E+12	0.00	7
5	0.747	3.20E+10	3.20E+10	0.00	7
6	0.301	5.54E+09	4.09E+09	3.00	7
7	-0.183	6.40E+10	2.32E+10	6.00	7
8	0.417	7.30E+08	7.30E+08	0.00	7
9	-0.299	3.47E+10	8.78E+09	6.00	7
10	0.292	2.61E+09	7.48E+08	6.00	7
11	-0.145	2.92E+10	3.52E+10	1.00	7
12	0.103	1.05E+10	1.26E+10	1.00	7
13	-0.090	1.66E+10	1.76E+10	1.00	7
14	-0.229	6.52E+10	5.82E+10	2.00	7
15	0.337	5.98E+09	1.70E+09	6.00	7
16	-0.515	1.98E+10	8.28E+09	6.00	7
17	0.044	9.00E+09	4.97E+09	3.00	7
18	-0.179	9.86E+10	1.12E+11	1.00	7
19	0.139	1.33E+09	1.33E+09	0.00	7
20	-0.359	2.15E+10	6.86E+09	6.00	7
21	-0.057	5.70E+09	1.71E+09	5.00	7
22	-0.139	8.78E+09	1.70E+09	6.00	7
23	-0.176	1.01E+10	3.68E+09	6.00	7
24	-0.294	2.48E+10	7.26E+09	6.00	7
25	-0.342	2.62E+09	3.34E+09	1.00	7

26	-0.524	2.45E+09	1.67E+09	6.00	7
27	0.202	1.23E+10	3.12E+09	6.00	7
28	-0.151	4.76E+10	5.53E+10	1.00	7
29	-0.317	1.84E+10	5.09E+09	6.00	7
30	-0.116	3.93E+10	3.93E+10	0.00	7
31	0.556	6.79E+09	8.30E+09	1.00	7
32	-0.030	3.45E+10	3.59E+10	1.00	7
33	-0.673	1.09E+09	9.08E+08	2.00	7
34	0.100	1.17E+09	1.17E+09	0.00	7
35	0.271	9.01E+09	3.66E+09	4.00	7
36	-0.086	9.78E+08	9.78E+08	0.00	7
37	-0.688	1.69E+11	1.69E+11	0.00	7
38	-0.188	4.74E+09	1.24E+09	6.00	7

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)

Cross ID	AR(1)	Variance	Lag	Max lag	Obs
1	-0.434	1.09E+10	0	0	7
2	0.731	5.06E+10	0	0	7
3	0.844	5.09E+10	0	0	7
4	0.181	7.92E+12	0	0	7
5	0.747	3.20E+10	0	0	7
6	0.301	5.54E+09	0	0	7
7	-0.183	6.40E+10	0	0	7
8	0.417	7.30E+08	0	0	7
9	-0.299	3.47E+10	0	0	7
10	0.292	2.61E+09	0	0	7
11	-0.145	2.92E+10	0	0	7
12	0.103	1.05E+10	0	0	7



13	-0.090	1.66E+10	0	0	7
14	-0.229	6.52E+10	0	0	7
15	0.337	5.98E+09	0	0	7
16	-0.515	1.98E+10	0	0	7
17	0.044	9.00E+09	0	0	7
18	-0.179	9.86E+10	0	0	7
19	0.139	1.33E+09	0	0	7
20	-0.359	2.15E+10	0	0	7
21	-0.057	5.70E+09	0	0	7
22	-0.139	8.78E+09	0	0	7
23	-0.176	1.01E+10	0	0	7
24	-0.294	2.48E+10	0	0	7
25	-0.342	2.62E+09	0	0	7
26	-0.524	2.45E+09	0	0	7
27	0.202	1.23E+10	0	0	7
28	-0.151	4.76E+10	0	0	7
29	-0.317	1.84E+10	0	0	7
30	-0.116	3.93E+10	0	0	7
31	0.556	6.79E+09	0	0	7
32	-0.030	3.45E+10	0	0	7
33	-0.673	1.09E+09	0	0	7
34	0.100	1.17E+09	0	0	7
35	0.271	9.01E+09	0	0	7
36	-0.086	9.78E+08	0	0	7
37	-0.688	1.69E+11	0	0	7
38	-0.188	4.74E+09	0	0	7

4. Kao (No Deterministic Trend)

Kao Residual Cointegration Test

Series: BD PAD DAU

Date: 02/16/19 Time: 14:47

Sample: 2009 2016

Included observations: 304

Null Hypothesis: No cointegration

Trend assumption: No deterministic trend

Automatic lag length selection based on SIC with a max lag of 1

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

	t-Statistic	Prob.
ADF	-0.186420	0.4261
Residual variance	5.27E+11	
HAC variance	2.66E+11	

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(RESID)

Method: Least Squares

Date: 02/16/19 Time: 14:47

Sample (adjusted): 2010 2016

Included observations: 266 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

RESID(-1)	-0.601945	0.058757	-10.24459	0.0000
R-squared	0.257163	Mean dependent var		137503.2
Adjusted R-squared	0.257163	S.D. dependent var		715870.9
S.E. of regression	616994.7	Akaike info criterion		29.50686
Sum squared resid	1.01E+14	Schwarz criterion		29.52033
Log likelihood	-3923.413	Hannan-Quinn criter.		29.51227
Durbin-Watson stat	1.539776			

Panel DOLS

Dependent Variable: BD

Method: Panel Dynamic Least Squares (DOLS)

Date: 02/16/19 Time: 15:23

Sample (adjusted): 2011 2016

Periods included: 6

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 228

Panel method: Pooled estimation

Fixed leads and lags specification (lead=0, lag=1)

Coefficient covariance computed using default method

Long-run variance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth) used for coefficient covariances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	1.105876	0.219703	5.033086	0.0000
DAU	1.169795	0.183280	6.382571	0.0000
R-squared	0.956502	Mean dependent var		1469828.
Adjusted R-squared	0.866568	S.D. dependent var		1103410.

S.E. of regression	403058.0	Sum squared resid	1.20E+13
Long-run variance	3.68E+10		



Lampiran C. Uji Statistik

Tabel Uji parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DAU	1.169795	0.183280	6.382571	0.0000
PAD	1.105786	0.219703	5.033086	0.0000

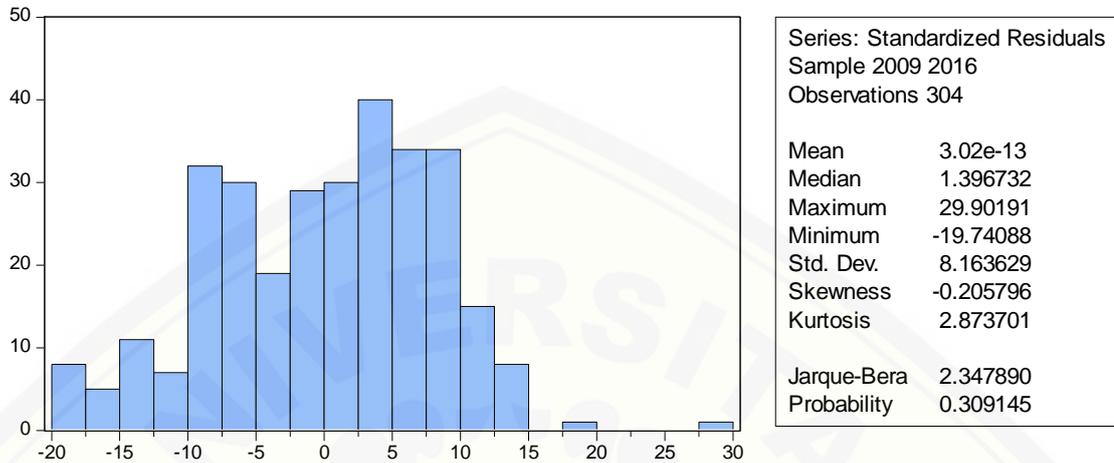
Uji Determinasi Berganda

Hasil Uji R-squared

R-squared	0.956502	Mean dependent var	1469828.
Adjusted R-squared	0.866568	S.D. dependent var	1103410.
S.E. of regression	403058.0	Sum squared resid	1.20E+13
Long-run variance	3.68E+10		

Lampiran D. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 02/16/19 Time: 15:23

Sample: 2009 2016

Included observations: 304

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF
PAD	0.048270	1.499894
DAU	0.033591	1.499894

